



**LAPORAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI
PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN (PP 39)
TRIWULAN IV TAHUN ANGGARAN 2025**

**BADAN STANDARDISASI DAN KEBIJAKAN JASA INDUSTRI
BALAI BESAR STANDARDISASI DAN
PELAYANAN JASA INDUSTRI AGRO**

KATA PENGANTAR

Sebagai salah satu upaya menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan benar, maka dilakukan penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (PP 39). Laporan Triwulan IV ini merupakan salah satu perwujudan pertanggungjawaban Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Agro (BBSPJIA) terhadap kinerja yang telah dicapai hingga Triwulan IV Tahun Anggaran 2025. Laporan ini memuat informasi kinerja yang telah dicapai berdasarkan indikator kinerja sesuai dengan Perjanjian Kinerja (Perjakin) dan *output* kegiatan, analisis capaian kinerja, hambatan dan kendala serta upaya tindak lanjut yang diperlukan.

Hasil evaluasi kinerja pada Triwulan IV ini diharapkan menjadi masukan-masukan yang konstruktif untuk perbaikan kinerja BBSPJIA selanjutnya. Selain itu juga, diharapkan menjadi masukan untuk menyusun sasaran strategis dan *output* kegiatan pada masa yang akan datang.

Semoga laporan ini bermanfaat, khususnya untuk BBSPJIA maupun sebagai perwujudan akuntabilitas publik.

Bogor, Januari 2025

Kepala,



Yuni Herlina Harahap

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1. Tugas Pokok dan Fungsi	I-1
1.2. Latar Belakang Kegiatan	I-2
1.3. Struktur Organisasi	I-3
BAB II RENCANA KEGIATAN	II-1
2.1. Kegiatan Tahun Anggaran 2025	II-1
2.2. Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan	II-6
BAB III PELAKSANAAN KEGIATAN	III-1
3.1. Hasil yang Telah Dicapai dan Analisis Capaian Kinerja	III-1
3.1.1. Hasil yang Telah Dicapai dan Analisis Capaian Kinerja Berdasarkan Indikator Kinerja dalam Penjanjian Kinerja	III-5
3.1.2. Hasil yang Telah Dicapai dan Analisis Capaian Kinerja Berdasarkan Indikator pada Kinerja Klasifikasi Output Kegiatan	III-28
3.2. Hambatan dan Kendala Pelaksanaan	III-32
3.2.1. Hambatan dan Kendala Pelaksanaan Perjanjian Kinerja	III-32
3.2.2. Hambatan dan Kendala Pelaksanaan Kinerja Output Kegiatan	III-33
3.3. Langkah Tindak Lanjut	III-34
3.3.1. Langkah dan Tindak Lanjut Pelaksanaan Perjanjian Kinerja	III-34
3.3.2. Langkah dan Tindak Lanjut Pelaksanaan Kinerja Output Kegiatan	III-35
BAB IV PENUTUP	IV-1
4.1. Realisasi Kegiatan	IV-1
4.2. Hambatan dan Kendala Pelaksanaan	IV-1
4.3. Langkah Tindak Lanjut	IV-2
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri, Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Agro selanjutnya disebut BBSPJIA, mempunyai tugas melaksanakan standardisasi industri, optimalisasi pemanfaatan teknologi industri dan industri 4.0, industri hijau, dan pelayanan jasa industri agro dan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. pelaksanaan analisis, penerapan, dan pengawasan standardisasi industri agro;
- b. pelaksanaan optimalisasi pemanfaatan teknologi industri di bidang industri agro;
- c. pendampingan dan konsultasi di bidang standardisasi, optimalisasi pemanfaatan teknologi industri, industri 4.0, industri hijau, dan jasa industri di bidang industri agro;
- d. pelaksanaan pengujian, kalibrasi, inspeksi teknis, penyelenggara uji profisiensi, produsen bahan acuan, dan verifikasi di bidang industri agro;
- e. pelaksanaan sertifikasi sistem manajemen, produk, teknologi, dan industri hijau di bidang industri agro;
- f. pelaksanaan fasilitasi kemitraan layanan jasa industri agro;
- g. pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi;
- h. pelaksanaan urusan perencanaan, program, anggaran, kepegawaian, keuangan, organisasi, tata laksana, administrasi kerja sama, hubungan masyarakat pengelolaan barang milik negara, persuratan, perpustakaan, kearsipan, dan rumah tangga; dan
- i. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

Sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor 517/KMK.05/2009 tanggal 28 Desember 2009, BBSPJIA ditetapkan sebagai instansi Pemerintah yang mendapatkan kewenangan menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan

Layanan Umum (PPK-BLU). Oleh karena itu, BBSPJIA dituntut menjalankan organisasinya secara profesional dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat industri agro secara lebih baik, transparan, akuntabel, efisien, produktif, dan mandiri.

Prinsip dasar pemerintahan yang baik adalah terdapatnya akuntabilitas publik dan transparansi dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Akuntabilitas diartikan sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan melalui sarana pertanggungjawaban secara periodik. Transparan mengandung arti bahwa praktik-praktik instansi pemerintahan akan diketahui umum dan anggota masyarakat memiliki akses untuk memperoleh informasi yang benar.

Dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 30 UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan tersebut dimaksudkan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam rencana, yang dilakukan melalui pemantauan dan pengawasan. Periode Laporan Pengendalian dan Evaluasi dilaksanakan pada setiap akhir triwulan.

Merujuk pada peraturan yang disebutkan di atas, Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Agro (BBSPJIA) sebagai salah satu instansi pemerintah berkewajiban untuk menyusun Laporan Triwulan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, yang memuat kinerja yang telah dicapai, analisis capaian kinerja, hambatan dan kendala pelaksanaan, serta langkah tindak lanjutnya. Susunan laporan mengacu kepada *Outline* Laporan Triwulan sesuai Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 150/M-IND/PER/12/2011 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perindustrian RI.

1.2. Latar Belakang Kegiatan

Kementerian Perindustrian telah mengkaji dan menyusun kebijakan-kebijakan nasional pembangunan industri. Dalam kebijakan ini, telah ditentukan industri prioritas yang akan dikembangkan dan didorong di masa yang akan datang. Pemilihan industri prioritas dimaksudkan agar proses pembangunan dapat dilakukan lebih fokus dan lebih mudah dalam mengukur kriteria keberhasilannya. Pengembangan setiap industri prioritas di masa depan dirumuskan ke dalam pola pengembangan secara terinci yang meliputi: strategi, sasaran dan pokok-pokok rencana aksi pengembangan, baik untuk jangka menengah maupun jangka panjang. Salah satu pokok-pokok rencana aksi bidang industri agro pada jangka menengah ditujukan untuk memperkuat rantai nilai (*value chain*) melalui penguatan struktur, diversifikasi, peningkatan nilai tambah, peningkatan mutu serta perluasan penguasaan pasar. Sedangkan jangka panjang difokuskan pada upaya pembangunan industri agro yang mandiri dan berdaya saing tinggi.

BBSPJIA sebagai unit pelaksana teknis bidang dilingkungan BSKJI berperan mendorong tumbuhnya industri agro nasional, BBSPJIA secara internal mempunyai tugas untuk meningkatkan kemampuan diri melalui peningkatan kompetensi serta memberikan jasa layanan teknis kepada industri kecil menengah dan besar. Dengan melaksanakan tugas tersebut, maka diharapkan akan berkembang industri agro yang kuat dan berdaya saing sehingga dapat memperluas lapangan kerja dan mendorong percepatan pembangunan industri nasional. Pada dasarnya peningkatan kompetensi BBSPJIA merupakan upaya yang dapat meningkatkan peran BBSPJIA dalam menunjang program pembangunan industri agro maupun meningkatkan jasa pelayanan teknis yang diberikan kepada masyarakat industri.

1.3. Struktur Organisasi

Sesuai Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri disebutkan bahwa Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Agro (BBSPJIA) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa

Industri, dinyatakan bahwa BBSPJIA dipimpin oleh seorang Kepala yang membawahi Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional. Berikut ini adalah struktur organisasi BLU-BBSJIA.



Gambar 1. Bagan Struktur Organisasi BBSPJIA

BAB II

RENCANA KEGIATAN

2.1. Kegiatan Tahun Anggaran 2025

Untuk melaksanakan program dan mencapai sasaran yang telah ditetapkan oleh Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI), maka Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Agro (BBSPJIA) menyusun kegiatan dan *output*, sesuai dengan *draft* Rencana Strategis (Renstra) BBSPJIA Tahun 2025–2029 dan Rencana Kinerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) TA. 2025.

Total pagu awal anggaran BBSPJIA TA.2025 sebesar Rp 43.216.257.000,- (Empat puluh tiga milyar dua ratus enam belas juta dua ratus lima puluh tujuh ribu rupiah), yang terdiri dari Rupiah Murni (RM) sebesar Rp 13.416.257.000,- (Tiga belas milyar empat ratus enam belas juta dua ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) dan PNBP BLU sebesar Rp 29.800.000.000,- (Dua puluh sembilan milyar delapan ratus juta rupiah). Sehubungan dengan Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, maka BBSPJIA mendapatkan efisiensi anggaran sebesar Rp 5.985.396.000,- (Lima milyar sembilan ratus delapan puluh lima juta rupiah tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) yang meliputi Rupiah Murni sebesar Rp 2.520.494.000,- (Dua milyar lima ratus dua puluh juta empat ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) dan PNBP sebesar Rp 3.464.902.000,- (Tiga milyar empat ratus enam puluh juta sembilan ratus dua ribu rupiah). Seiring dengan adanya kebijakan relaksasi blokir anggaran dari Kementerian Keuangan, sampai akhir tahun 2025, pagu efektif BBSPJIA menjadi Rp 40.695.763.000,- (Empat puluh milyar enam ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu rupiah) yang terdiri dari Rupiah Murni (RM) sebesar Rp 10.895.763.000,- (Sepuluh milyar delapan ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu rupiah) dan PNBP BLU sebesar Rp 29.800.000.000,- (Dua puluh sembilan milyar delapan ratus juta rupiah) Pagu tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan Tahun 2025 yang terdiri dari 2 (dua) Program, yaitu:

- 1) Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri, yang terdiri 2 (dua) KRO yaitu:
 - ✓ 6077.BAD: Pelayanan Publik Kepada Industri
 - ✓ 6077.CAH: Sarana Bidang Industri dan Perdagangan

2) Program Dukungan Manajemen, yang terdiri 3 (tiga) KRO, yaitu :

- ✓ 6042.EBA : Layanan Dukungan Manajemen Internal
- ✓ 6042.EBB : Layanan Sarana Dan Prasarana Internal
- ✓ 6042.EBC : Layanan Manajemen SDM Internal

**Tabel 2.1. Program dan Klasifikasi Rincian Output (KRO) BBSPJIA
TA. 2025 (Revisi ke-00)**

KODE	PROGRAM/KRO	Volume KRO		Anggaran
		Volume	Satuan	
019.07.EC	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri			12.169.080.000
6077.BAD	Pelayanan Publik kepada industri	2298	Industri	10.619.080.000
6077.CAH	Sarana Bidang Industri dan Perdagangan	5	Unit	1.550.000.000
019.07.WA	Program Dukungan Manajemen			31.047.177.000
6042.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	4	Layanan	30.437.177.000
6042.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	31	Unit	190.000.000
6042.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	80	Orang	420.000.000
Total				43.216.257.000

Setelah dilakukan revisi ke-14 DIPA, maka rincian Program dan Klasifikasi Rincian Output (KRO) adalah sebagai berikut.

**Tabel 2.2. Program dan Klasifikasi Rincian Output (KRO) BBSPJIA
TA. 2025 (Revisi ke-14)**

KODE	PROGRAM/KRO	Volume KRO		Anggaran
		Volume	Satuan	
019.07.EC	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri			16.659.080.000
6077.BAD	Pelayanan Publik kepada industri	2648	Industri	12.265.480.000
6077.CAH	Sarana Bidang Industri dan Perdagangan	13	Unit	4.293.600.000
019.07.WA	Program Dukungan Manajemen			32.214.851.000
6042.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	4	Layanan	31.604.851.000
6042.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	31	Unit	190.000.000
6042.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	80	Orang	420.000.000
Total				49.106.257.000

Berdasarkan kelompok Jenis Belanja, maka rincian anggaran BBSPJIA TA. 2025 pada Triwulan IV adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.3. Rincian Pagu Efektif BBSPJIA berdasarkan Jenis Belanja
TA. 2025**

NO.	JENIS BELANJA	PAGU	%
I	Rupiah Murni (RM)	13.183.931.000	26.98%
1	Belanja Pegawai [51]	9.910.563.000	
2	Belanja Barang [52]	1.428.159.000	
3	Belanja Modal [53]	199.966.500	
II	PNBP BLU	29.800.000.000	60.97%
1	Belanja Pegawai [51]	-	
2	Belanja Barang [52]	28.064.000.000	
3	Belanja Modal [53]	1.736.000.000	
III	Saldo Awal BLU	5.890.000.000	12,05%
1	Belanja Pegawai [51]	-	
2	Belanja Barang [52]	3.192.400.000	
3	Belanja Modal [53]	2.697.600.000	
	Total	48,873,931,000	

Pada bulan Juli 2025 telah dilakukan revisi penambahan anggaran dari saldo kas BLU sebesar Rp 5.890.000.000,- (Lima milyar delapan ratus sembilan puluh juta rupiah) yang digunakan untuk pengadaan peralatan laboratorium, peralatan penunjang operasional, bahan baku, bahan kimia, bahan penolong serta suku cadang.

Selain itu, pada bulan Nopember 2025 sudah dilaksanakan revisi anggaran berupa relaksasi blokir anggaran tahap III, dimana pagu anggaran sebesar Rp 1.236.212.000,- (Satu milyar dua ratus tiga puluh enam juta dua ratus dua belas ribu rupiah) yang tadinya diblokir, dapat digunakan untuk kegiatan layanan perkantoran berupa pengadaan peralatan laboratorium, pembelian bahan kimia serta perjalanan dinas dalam rangka layanan operasional.

Adapun rincian riwayat revisi anggaran tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Revisi	Nomor Revisi DIPA	Tanggal	Pagu (ribuan Rupiah)			Lokasi Revisi	Keterangan
			RM	BLU	Total		
1	SP DIPA-019.07.2.24713 6/2024	21 Februari 2025	13,416,257	29,800,000	43,216,257	DJA	Efisiensi Anggaran berdasarkan Inpres No. 1 Tahun 2025 sebesar Rp. 5.985.396.000,-
2	SP DIPA-019.07.2.24713 6/2024	3 Maret 2025	13,416,257	29,800,000	43,216,257	DJA	<ul style="list-style-type: none"> Efisiensi Anggaran berdasarkan Inpres No. 1 Tahun 2025 Perubahan atau Pergeseran Rincian Anggaran dalam hal pagu anggaran tetap
3	SP DIPA-019.07.2.24713 6/2024	Maret 2025	13,416,257	29,800,000	43,216,257	Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov Jabar	Perubahan atau Pergeseran Rincian Anggaran dalam hal pagu anggaran tetap
4	SP DIPA-019.07.2.24713 6/2025	16 April 2025	13,416,257	29,800,000	43,216,257	Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov Jabar	Ralat rencana penarikan dana atau rencana penerimaan dalam halaman III DIPA.
5	SP DIPA-019.07.2.24713 6/2025	27 Mei 2025	13,416,257	29,800,000	43,216,257	DJA	Relaksasi Efisiensi Anggaran Rp. 213.235.000,-
6	SP DIPA-019.07.2.24713 6/2025	5 Juni 2025	13,416,257	29,800,000	43,216,257	Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov Jabar	Perubahan atau Pergeseran Rincian Anggaran dalam hal pagu anggaran tetap
7	SP DIPA-019.07.2.24713 6/2025	8 Juli 2025	13,416,257	29,800,000	43,216,257	Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov Jabar	Perubahan atau Pergeseran Rincian Anggaran dalam hal pagu anggaran tetap

Revisi	Nomor Revisi DIPA	Tanggal	Pagu (ribuan Rupiah)			Lokasi Revisi	Keterangan
			RM	BLU	Total		
8	SP DIPA-019.07.2.24713 6/2025	8 Juli 2025	13,416,257	29,800,000	43,216,257	Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov Jabar	Ralat rencana penarikan dana atau rencana penerimaan dalam halaman III DIPA.
9	SP DIPA-019.07.2.24713 6/2025	23 Juli 2025	13,416,257	35,690,000	49,106,257	Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov Jabar	<ul style="list-style-type: none"> • Perubahan atau Pergeseran Rincian Anggaran dalam hal pagu bertambah • Penggunaan Saldo Kas BLU sebesar Rp. 5,890,000,000
10	SP DIPA-019.07.2.24713 6/2025	22 Agustus 2025	13,416,257	35,690,000	49,106,257	DJA	Relaksasi Efisiensi Anggaran Rp. 601,556,000,-
11	SP DIPA-019.07.2.24713 6/2025	6 Oktober 2025	13,416,257	35,690,000	49,106,257	Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov Jabar	Perubahan atau Pergeseran Rincian Anggaran dalam hal pagu anggaran tetap.
12	SP DIPA-019.07.2.24713 6/2025	10 November 2025	13,183,931	35,690,000	48,873,931	DJA	<ul style="list-style-type: none"> • Revisi dalam rangka Pagu Anggaran Berubah • Relaksasi Efisiensi Anggaran Rp. 1.236.212.000,- • Pengurangan belanja pegawai Rp. 232.326.000,-
13	SP DIPA-019.07.2.24713 6/2025	12 November 2025	13,183,931	35,690,000	48,873,931	Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov Jabar	Perubahan atau Pergeseran Rincian Anggaran dalam hal pagu anggaran tetap.
14	SP DIPA-019.07.2.24713 6/2025	12 Desember 2025	13,183,931	35,690,000	48,873,931	KPA	Perubahan atau Pergeseran Rincian Anggaran dalam hal pagu anggaran tetap.

Sehubungan telah terbit Keputusan Menteri Keuangan Nomor 358/KMK.05/2018 tanggal 2 Mei 2018 tentang Penerapan Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola Dewan Pengawas dan Pegawai Badan Layanan Umum Balai Besar Industri Agro pada Kementerian Perindustrian, maka tunjangan kinerja dianggarkan dari anggaran PNBP BLU sendiri dan dikategorikan sebagai Belanja Barang yang bersumber dari PNBP BLU.

Penjelasan *output* semua rencana kegiatan/komponen/subkomponen yang akan dihasilkan sebagai berikut:

6077. BAD Pelayanan Publik kepada Industri

KRO ini terdiri dari 9 (sembilan) Rincian Output (RO) sesuai dengan jenis layanan teknis yang ada di BBSPJIA. Adapun RO dan volume RO BBSPJIA pada TA. 2025 ini adalah sebagai berikut:

- 1) Jasa pelayanan teknis pengujian BBSPJIA (1.300 Industri)
- 2) Jasa pelayanan teknis kalibrasi BBSPJIA (480 Industri)
- 3) Jasa pelayanan teknis sertifikasi BBSPJIA (360 Industri)
- 4) Jasa pelayanan bimbingan dan pendampingan teknis BBSPJIA (60 Industri)
- 5) Jasa pelayanan inspeksi teknik BBSPJIA (35 Industri)
- 6) Jasa optimalisasi pemanfaatan teknologi industri BBSPJIA (3 Industri)
- 7) Jasa pelayanan teknis konsultasi teknis/manajemen industri BBSPJIA (10 Industri)
- 8) Jasa penyelenggaraan uji profisiensi BBSPJIA (50 Industri)

Output yang dihasilkan berfungsi untuk :

1. Memenuhi kebutuhan dunia industri terhadap jasa layanan pengujian berbagai bahan baku dan produk pangan.
2. Membantu pemeliharaan keakuratan berbagai peralatan yang dimiliki oleh pelaku industri dan institusi melalui kalibrasi berbagai peralatan tersebut.
3. Menyelenggarakan berbagai pelatihan untuk meningkatkan kemampuan, pengetahuan dan keterampilan masyarakat/industri dan aparat pemerintah dalam hal teknologi pengolahan (Pangan dan Non-pangan), pengujian, kalibrasi, dan sistem manajemen mutu untuk pengembangan industri kecil dan menengah.
4. Merumuskan, menetapkan, merevisi standar yang digunakan oleh Badan Standarisasi Nasional dalam perumusan SNI.
5. Membantu pelaku industri atau institusi dalam menyusun dan menerapkan sistem manajemen mutu, sistem manajemen keamanan pangan, dan *set-up* Laboratorium Uji.

6. Meningkatkan peran dan kinerja BBSPJIA dalam membantu dan melayani masyarakat industri yang membutuhkan jasa layanan sertifikasi baik produk, manajemen mutu maupun sistem keamanan pangan.
7. Membantu pengembangan Industri Kecil dan Menengah (IKM) melalui perancangan peralatan produk, proses pengolahan industri agro, dan merevitalisasi peralatan proses pengolahan industri agro.
8. Menyediakan jasa litbang untuk membantu industri pangan maupun non pangan dalam meningkatkan mutu maupun diversifikasi produk, pengkajian teknologi untuk proses pengolahan maupun minimalisasi kerusakan mutu produk selama proses pengolahan maupun penyimpanan, uji coba produksi untuk studi pasar (*market research*), dan pengembangan produk baru.
9. Membantu dunia industri dalam hal menjaga keamanan pangan melalui jasa uji kecukupan panas, penanganan pencemaran lingkungan, dan uji profisiensi.

6077. CAH Sarana Bidang Industri Dan Perdagangan

KRO ini terdiri dari 1 (satu) Rincian Output (RO). Adapun RO dan volume RO BBSPJIA pada TA. 2025 ini adalah sebagai berikut:

- 1) Peralatan fasilitas laboratorium/workshop/layanan BBSPJIA (5 unit)

Output ini bertujuan untuk pengadaan Peralatan Laboratorium Pengujian, Penyelenggaraan Uji Profisiensi dan Inspeksi Teknis.

6042.EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal

KRO ini terdiri dari 2 (dua) Rincian Output (RO). Adapun RO dan volume RO BBSPJIA pada TA 2025 ini adalah sebagai berikut:

- 1) 958. Layanan Hubungan Masyarakat (3 layanan), yang bertujuan sebagai sarana promosi layanan jasa teknis yang ada di BBSPJIA.
- 2) 994. Layanan Perkantoran (1 layanan), bertujuan untuk memenuhi hak atau kompensasi yang diterima oleh pegawai serta untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tupoksi BBSPJIA.

6042.EBB. Layanan Sarana dan Prasarana Internal

KRO ini terdiri dari 1 (satu) Rincian Output (RO). Adapun RO dan volume RO BBSPJIA pada TA. 2025 ini adalah sebagai berikut:

1) Layanan Sarana Internal (31 Unit)

Output ini terdiri atas 2 (dua) komponen, yaitu:

- 052. Pengadaan perangkat pengolahan data dan komunikasi
- 053. Pengadaan peralatan inventaris perkantoran

6042.EBC. Layanan Manajemen SDM Internal

KRO ini terdiri dari 1 (satu) Rincian Output (RO). Adapun RO dan volume RO BBSPJIA pada TA. 2025 ini adalah sebagai berikut:

1) Layanan Pendidikan dan Pelatihan (80 orang).

Pegawai BBSPJIA per bulan Nopember 2025 berjumlah 179 orang, yang terdiri dari PNS sebanyak 116 orang (64,8%), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (P3K) sebanyak 28 orang (15,6%) dan Pegawai Non PNS (PHL) 35 orang (19,6%). Latar belakang pendidikan SDM BBSPJIA sebagian besar berpendidikan teknis seperti Teknik Pertanian, Teknologi Industri Pertanian, Teknologi Pangan, Teknik Kimia, Teknik Mesin, Teknik Fisika, MIPA, Kimia Analisis dan tenaga non teknis seperti Magister Manajemen, Ilmu Administrasi, Ilmu Hukum, Ekonomi Akuntansi dan Ekonomi Manajemen. SDM yang berlatar pendidikan SMP ke bawah ditempatkan pada posisi keamanan dan kebersihan.

Komposisi pegawai BBSPJIA per tanggal 1 Nopember 2025 dapat dilihat pada Tabel 2.4 sebagai berikut:

Tabel 2.4. Komposisi Pegawai BBSPJIA berdasarkan status pegawai

No	Status pegawai	Jumlah (Orang)
1	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	116
2	Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K)	28
3	P3K Paruh Waktu	-
4	Pegawai Harian Lepas (PHL)	11
5	Pegawai Alih Daya (<i>Outsourcing</i>)	24
Total		179

2)

Dengan penambahan sumber daya manusia baik Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (P3K) yang cukup banyak di tahun 2023 sampai 2025 maka diharapkan dapat memperkuat layanan jasa teknis maupun dukungan penyelenggaraan administrasi BBSPJIA.

2.2. Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan

Dalam rangka pengukuran dan evaluasi kinerja kegiatan BBSPJIA, maka perlu diuraikan dan ditetapkan sasaran strategis kegiatan dan indikator kerjanya. Sasaran strategis merupakan *outcome* dari kegiatan dan *outcome* kegiatan diperoleh apabila *output* kegiatan dapat berfungsi. Tabel 2.5 berikut menggambarkan Sasaran Strategis BBSPJIA TA. 2025 atau disebut Perjanjian Kinerja (Perjakin) BBSPJIA Tahun 2025.

Tabel 2.5. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja BBSPJIA TA. 2025

Kode	Sasaran Strategis (SS)	Indikator Kinerja		Target	Satuan	Ket
TJ	Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan jasa industri	1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	3,72	Indeks	IKU
		2	Jumlah perusahaan industri/pelaku usaha/instansi yang memanfaatkan layanan jasa industri	3.750	Perusahaan Industri/ Pelaku Usaha/ Instansi	IKU
SK.1	Terwujudnya layanan jasa industri yang profesional	1	Persentase pelayanan tepat waktu Layanan sesuai <i>Service Level Agreement (SLA)</i>	95,00	Persen	Non IKU
		2	Nilai <i>Net Promoter Score (NPS)</i>	50	Nilai	Non IKU
SK.2	Terwujudnya layanan jasa industri yang mandiri	1	Indeks peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	1	Indeks	Non IKU
		2	Jumlah hasil layanan jasa industri	20.600	Hasil Layanan	Non IKU
		3	Nilai <i>Revenue on Asset (RoA)</i>	8,40	Persen	Non IKU
		4	Rasio Pendapatan Operasional terhadap Biaya Operasional (POBO)	75,00	Persen	Non IKU
SK.3	Terwujudnya SDM yang profesional	1.	Indeks Profesionalitas ASN (IPASN)	81,3	Indeks	Non IKU
SK.4	Penguatan sistem informasi terintegrasi dan pelayanan publik	1	Persentase jenis layanan yang datanya terintegrasi dengan sistem informasi BSKJI	20,00	Persen	Non IKU
		2	Tingkat Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	77	Persen	Non IKU
		3	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	4,20	Indeks	Non IKU
SK.5	Tercapainya pengawasan internal yang efektif dan efisien	1	Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh Satker	60	Persen	Non IKU
		2	Nilai minimal hasil pengawasan kearsipan internal (Unit Kearsipan)	85	Nilai	Non IKU
SK.6	Terwujudnya akuntabilitas organisasi	1	Nilai minimal Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Satker	79,90	Nilai	Non IKU
		2	Nilai minimal Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	95,00	Nilai	Non IKU
		3	Penilaian dan Analisis Laporan Keuangan	75	Nilai	Non IKU

Kode	Sasaran Strategis (SS)	Indikator Kinerja		Target	Satuan	Ket
SK.7	Meningkatnya penggunaan Produk Dalam Negeri dalam rangka menunjang produktivitas Industri	1	Persentase penggunaan Produk Dalam Negeri dalam pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah	81	Persen	Non IKU

BAB III

PELAKSANAAN KEGIATAN

3.1. Hasil Yang Telah Dicapai dan Analisis Capaian Kinerja

Pada awal tahun 2025 Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Agro (BBSPJIA) telah membuat Perjanjian Kinerja (Perkin) yang merupakan pernyataan kesanggupan dari Kepala BBSPJIA kepada Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri untuk mewujudkan suatu target kinerja tertentu. Pernyataan ini ditandatangani oleh penerima amanah sebagai tanda kesanggupan untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dan pemberi amanah sebagai persetujuan atas target kinerja yang ditetapkan tersebut dan menjadi kontrak kinerja Kepala BBSPJIA.

Pada bulan Desember 2025, dikarenakan adanya beberapa perubahan substansi pada dokumen Rencana Strategis BSKJI Tahun 2025-2029 sehingga mengakibatkan perubahan pada Perjanjian Kinerja BBSPJIA Tahun 2025 terutama pada sebagian indikator kinerja, target, satuan dan *baseline*.

Rencana kerja untuk mewujudkan target kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja selanjutnya dirinci ke dalam rencana aksi setiap triwulan yang dipantau secara berkala. Rencana aksi yang disusun guna mendukung upaya pencapaian target kinerja BBSPJIA dapat dilihat pada lampiran.

Hasil yang telah dicapai untuk setiap indikator kinerja sasaran strategis kegiatan pada Perjanjian Kinerja BBSPJIA TA. 2025 sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 3.2. Perkembangan Capaian Penjanjian Kinerja BBSPJIA TA. 2025

Kode	Sasaran Strategis (SS)	Indikator Kinerja		Target	Satuan	TW I	TW II	TW III	TW IV
TJ	Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan jasa industri	1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	3,72	Indeks	3,73	3,79	3,80	3,76
		2	Jumlah perusahaan industri/pelaku usaha/instansi yang memanfaatkan layanan jasa industri	3.750	Perusahaan Industri/ Pelaku Usaha/ Instansi	703	1.917	2.969	3.734
SK.1	Terwujudnya layanan jasa industri yang profesional	1	Persentase pelayanan tepat waktu Layanan sesuai <i>Service Level Agreement (SLA)</i>	95,00	Persen	100	100	100	100
		2	Nilai <i>Net Promoter Score (NPS)</i>	50	Nilai	76,4	77,89	79,53	72,99
SK.2	Terwujudnya layanan jasa industri yang mandiri	1	Indeks peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	1	Indeks	<i>On progress</i>	<i>On progress</i>	<i>On progress</i>	2
		2	Jumlah hasil layanan jasa industri	20.600	Hasil Layanan	5.422	10.363	16.745	23.090
		3	Nilai <i>Revenue on Asset (RoA)</i>	8,40	Persen	1.73	3.68	5.96	8.85
		4	Rasio Pendapatan Operasional terhadap Biaya Operasional (POBO)	75,00	Persen	64,29	66,46	73,15	81,36
SK.3	Terwujudnya SDM yang profesional	1.	Indeks Profesionalitas ASN (IPASN)	81,3	Indeks	<i>On progress</i>	<i>On progress</i>	<i>On progress</i>	82,68
SK.4	Penguatan sistem informasi terintegrasi dan pelayanan publik	1	Persentase jenis layanan yang datanya terintegrasi dengan sistem informasi BSKJI	20,00	Persen	<i>On progress</i>	<i>On progress</i>	<i>On progress</i>	20,00
		2	Tingkat Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	77	Persen	<i>On progress</i>	<i>On progress</i>	<i>On progress</i>	78,30
		3	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	4,20	Indeks	<i>On progress</i>	<i>On progress</i>	4,63	4,35
SK.5	Tercapainya pengawasan internal yang efektif dan efisien	1	Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh Satker	60	Persen	<i>On progress</i>	<i>On progress</i>	<i>On progress</i>	100
		2	Nilai minimal hasil pengawasan kearsipan internal (Unit Kearsipan)	85,00	Nilai	<i>On progress</i>	<i>On progress</i>	89,50	89,50
SK.6	Terwujudnya akuntabilitas organisasi	1	Nilai minimal Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Satker	79,90	Nilai	83,00	83,00	83,00	83,00
		2	Nilai minimal Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	95,00	Nilai	100	100	100	97,14
		3	Penilaian dan Analisis Laporan Keuangan	75	Nilai	<i>On progress</i>	<i>On progress</i>	<i>On progress</i>	93,00
SK.7	Meningkatnya penggunaan Produk Dalam Negeri dalam rangka menunjang produktivitas Industri	1	Persentase penggunaan Produk Dalam Negeri dalam pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah	81	Persen	<i>On progress</i>	56,25	57,88	85,17

3.1.1. Hasil Yang Telah Dicapai dan Analisis Capaian Kinerja Berdasarkan Indikator Kinerja dalam Perjanjian Kinerja

Untuk mendukung tercapainya target pada Perjanjian Kinerja BBSPJIA TA. 2025, maka telah disusun rencana kegiatan. Hasil yang telah dicapai untuk setiap indikator kinerja sasaran strategis kegiatan sampai dengan Triwulan IV TA. 2025, adalah sebagai berikut:

1) Tujuan: Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan jasa industri

Sasaran Strategis (SS)	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Realisasi	Capaian	Sampai dengan Triwulan IV			
						% Fisik		Rencana Kegiatan	Realisasi
						Target	Ralisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan jasa industri	1 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	3,72	Indeks	3,76	101,07%	100	100	Membuat kuesioner survei di google form; Melaksanakan Survei; Mengolah data hasil survei	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun kuesioner survei 2. Menentukan responden 3. Menyampaikan atau mengirimkan kuesioner kepada responden 4. Menghitung Indeks Kepuasan Masyarakat Triwulan IV Tahun 2025 5. Mengevaluasi hasil Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap perbaikan layanan jasa industri
	2 Jumlah perusahaan industri/pelaku usaha/instansi yang memanfaatkan layanan jasa industri	3.750	Perusahaan Industri/ Pelaku Usaha / Instansi	3.734	79,17	100	99,57	Mengidentifikasi utilisasi layanan jasa industri di dalam negeri yang meliputi, rancang bangun dan perekayasaan di bidang industri, standarisasi dan sertifikasi, pengujian, kalibrasi serta bombing dan pendampingan teknis	<ol style="list-style-type: none"> 1. Identifikasi target pasar 2. Evaluasi layanan yang ada 3. Penyusunan strategi pemasaran 4. Peningkatan <i>branding</i> dan <i>awareness</i> 5. Sosialisasi dan edukasi 6. Kolaborasi dan kemitraan

Tujuan mempunyai Indikator Kinerja:

1) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

a) Hasil yang telah dicapai dan analisis capaian kinerja

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Tata cara perhitungan responden, penyusunan kuesioner dan indeks mengacu pada Permen PANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. IKM berada pada skala 1 s.d. 4, di mana nilai indeks 1,00-2,5996 berarti tidak baik, nilai indeks 2,60-3,064 kurang baik, nilai indeks 3,0644-3,532 baik, dan nilai indeks 3,5324-4,00 berarti sangat baik.

Setelah dilakukan perhitungan pada jasa layanan pengujian, kalibrasi, sertifikasi, pelatihan, konsultasi, inspeksi teknis, verifikasi TKDN dan uji profesiensi pada periode Oktober hingga Desember 2025 maka didapat indeks IKM **3,76** untuk BBSPJIA. Detil angka komponen IKM dan hasil perhitungan dapat dilihat pada Tabel 3.3 di bawah ini:

Tabel 3.3 Perhitungan Indeks Kepuasan Masyarakat Triwulan IV

Jasa Layanan	Σ	Indeks Kepuasan Pelanggan	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
Pengujian	285	3.72	3.78	3.75	3.71	3.64	3.74	3.69	3.77	3.65	3.72
Kalibrasi	75	3.82	3.85	3.80	3.79	3.75	3.80	3.85	3.91	3.80	3.81
Sertifikasi	48	3.74	3.73	3.69	3.65	3.60	3.79	3.83	3.81	3.75	3.77
Pelatihan	378	3.72	3.60	3.61	3.70	3.60	3.78	3.82	3.86	3.75	3.73
Konsultasi	10	3.78	3.80	3.80	3.70	3.60	3.80	3.80	3.80	3.80	3.90
Inspeksi Teknis	26	3.74	3.73	3.77	3.58	3.38	3.69	3.85	3.92	3.92	3.81
Verifikasi TKDN	9	3.98	4.00	4.00	4.00	3.78	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
Uji Profisiensi	49	3.59	3.69	3.69	3.20	3.57	3.67	3.63	3.67	3.57	3.59
Jumlah responden	880	3.76	3.77	3.76	3.67	3.61	3.78	3.81	3.84	3.78	3.79

Keterangan :

U1	:	Persyaratan	U6	:	Kompetensi pelaksana
U2	:	Sistem, mekanisme, prosedur	U7	:	Perilaku pelaksana
U3	:	Waktu pelayanan	U8	:	Penanganan pengaduan, saran & masukan
U4	:	Biaya/ tarif	U9	:	Sarana dan prasarana
U5	:	Produk spesifikasi jenis layanan			

b) Kendala

Ada beberapa kendala/permasalahan dalam kegiatan ini, diantaranya:

- Pelanggan enggan mengisi kuesioner.
- Pelanggan cenderung memberikan nilai netral (baik), meskipun puas dengan layanan yang telah diberikan.

c) Rekomendasi

Evaluasi dari kegiatan ini adalah selalu meningkatkan komunikasi dan edukasi kepada pelanggan dengan tetap memperhatikan kualitas layanan agar capaian IKM sesuai target dan dapat meningkatkan partisipasi pelanggan dalam pengisian dan pengembalian kuesioner kepuasan pelanggan yang telah diisi.

Rencana tindak lanjut:

- Memonitor jumlah pengisian kuesioner, jika terdapat pelanggan yang belum mengisi maka petugas akan mengirimkan kuesioner ulang melalui aplikasi *Whatsapp*.
- Menginput ulang data hasil survei (*google sheets*) pada aplikasi SKM untuk laporan BBSPJIA kepada Biro Humas

2) Jumlah perusahaan industri/pelaku usaha/instansi yang memanfaatkan layanan jasa industri

a) Hasil yang telah dicapai dan analisis capaian kinerja

Jumlah perusahaan industri/pelaku usaha yang memanfaatkan layanan jasa industri merujuk pada jumlah total entitas bisnis atau perusahaan yang bergerak dalam sektor industri dan/atau pelanggan yang menggunakan layanan yang disediakan oleh BBSPJIA. Data jumlah industri pengguna layanan jasa dihitungkan dengan cara menghitung jumlah perusahaan industri/pelaku usaha/ pelanggan yang memanfaatkan layanan jasa industri di BBSPJIA pada tahun ke-n. Setelah dilakukan perhitungan jumlah industri yang menggunakan jasa layanan pengujian, kalibrasi, sertifikasi, pelatihan, konsultasi, inspeksi teknis, verifikasi TKDN dan uji profisiensi pada periode Januari hingga Desember 2025 maka didapat jumlah industri yang menggunakan jasa layanan BBSPJIA pada bulan Januari hingga Desember 2025 adalah **3.734** perusahaan industri. Detil jumlah perusahaan industri per jasa layanan dapat dilihat pada Tabel 3.8 di bawah ini:

Tabel 3.4 Data pengguna layanan jasa teknis BBSPJIA bulan Januari – Desember 2025.

Jasa Layanan	Σ Perusahaan/ Industri
Pengujian	1.380
Kalibrasi	408
Sertifikasi	346
Pelatihan	91
Konsultasi	12
Inspeksi Teknis	33
Uji Profisiensi	325
Sampling	139
Verifikasi TKDN	46
Sewa Aset (Aula)	35
Optimaliasasi Teknologi	4
Uji Masa Simpan	2
Pemeriksa Halal	30
Penggunaan Tenaga Ahli	13
Penggunaan Peralatan Dan Mesin	235
Jasa Lainnya	635
Jumlah Industri	3.734

Realisasi pada triwulan ini mencapai 99,57% dari target tahun 2025 sebesar 3.750 perusahaan industri. Salah satu faktor penyebab tidak tercapainya target yaitu adanya kebijakan

b) Kendala

1. Banyak industri, terutama skala kecil dan menengah (UMKM), belum mengetahui manfaat menggunakan layanan BBSPJIA.
2. Beberapa industri lebih memilih lembaga dengan harga lebih murah atau proses yang lebih cepat.
3. Adanya kebijakan efisiensi anggaran untuk kegiatan pemasaran/promosi sehingga sulit untuk menjalankan promosi besar-besaran secara masif.
4. Terbatasnya atau kurangnya sistem layanan pelanggan yang responsif untuk menangani pertanyaan atau permintaan industri dengan cepat

c) Rekomendasi

Evaluasi dari pelaksanaan kegiatan ini adalah diperlukan pendekatan kembali kepada pelanggan yang beralih dari BBSPJIA dengan tetap mendorong upaya peningkatan kapasitas layanan dan kualitas layanan.

Rencana tindak lanjut:

1. Optimalisasi media sosial, website, dan iklan digital untuk menjangkau lebih banyak industri.
2. Kunjungan perusahaan dan penawaran konsultasi langsung
3. Publikasi testimoni klien sukses

2) Sasaran Strategis I: Terwujudnya layanan jasa industri yang profesional

Sasaran Strategis (SS)	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Realisasi	Capaian	Sampai dengan Triwulan IV				
						% Fisik		Rencana Kegiatan	Realisasi	
						Target	Ralisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Terwujudnya layanan jasa industri yang profesional	1	Persentase pelayanan tepat waktu Layanan sesuai <i>Service Level Agreement</i> (SLA)	95,00	Persen	100	105,26%	100	100	Melakukan pelayanan sesuai SPM	Melakukan pelayanan sesuai SPM
	2	Nilai <i>Net Promoter Score</i> (NPS)	50	Nilai	79,53	265,10	100	100	Melakukan perhitungan nilai NPS Triwulan IV	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun kuesioner survei 2. Menentukan responden pengguna layanan 3. Menyampaikan atau mengirimkan kuesioner kepada responden 4. Menghitung nilai <i>Net Promoter Score</i> (NPS) terhadap layanan jasa industri 5. Mengevaluasi hasil <i>Net Promoter Score</i> (NPS) terhadap perbaikan layanan jasa industri

Sasaran Kegiatan I mempunyai Indikator Kinerja:

1) Persentase pelayanan tepat waktu Layanan sesuai *Service Level Agreement* (SLA)

a) Hasil yang telah dicapai dan analisis capaian kinerja

Service Level Agreement (SLA) pada BBSPJIA adalah komitmen tertulis antara BBSPJIA dan pihak yang menerima layanan (misalnya, perusahaan/pelakuusaha industri/pelanggan) mengenai kualitas, cakupan, dan standar layanan yang diberikan. SLA ini biasanya mencakup beberapa elemen penting untuk memastikan layanan yang

diberikan sesuai dengan harapan dan kebutuhan penerima layanan. SLA pada UPT merujuk pada Standar Pelayanan Minimum (SPM). Waktu layanan pada SLA adalah berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu layanan. Menghitung jumlah order/SPK/transaksi yang berhasil diselesaikan tepat waktu sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) atau SLA pada tahun ke-n dibagi total order/SPK/transaksi pada tahun ke-n dikalikan 100%.

Persentase pemenuhan waktu layanan sesuai SLA

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\Sigma \text{Pelayanan yang terselesaikan tepat waktu sesuai SLA}}{\Sigma \text{Pelayanan yang diberikan}} \times 100\% \\
 &= \frac{100}{100} \times 100\% \\
 &= 100\%
 \end{aligned}$$

Catatan:

Untuk layanan yang bersifat kontrak, waktu SPM ditetapkan berdasarkan durasi kontrak. Setelah dilakukan perhitungan dan evaluasi jumlah transaksi yang berhasil diselesaikan tepat waktu terhadap Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada layanan jasa teknis pengujian, kalibrasi, sertifikasi dan inspeksi teknis pada periode Januari hingga Desember 2025 maka **rata-rata ketepatan waktu bulan Desember 2025 = 100 %** (capaian target 95 % per bulan: 105,26 %), sedangkan **rata-rata ketepatan waktu bulan Januari – Desember 2025 = 100 %** (capaian target 95 % per bulan: 105,26).

Adapun rincian pelayanan tepat waktu sesuai jenis layanan adalah sebagai berikut:

1. Pengujian

No	Bulan	Σ Sampel Masuk	Σ Target Sampel Selesai	Tepat Waktu	%	Capaian Target 95 % per bulan
1.	Januari	482	589	589	100	105,26
2.	Februari	856	658	658	100	105,26
3.	Maret	1.571	843	843	100	105,26
4.	April	646	732	732	100	105,26
5.	Mei	656	764	764	100	105,26
6.	Juni	1.290	1.146	1.146	100	105,26
7	Juli	1.209	1.962	1.962	100	105,26
8	Agustus	763	840	840	100	105,26
9	September	1564	980	980	100	105,26
10	Oktober	823	1.317	1.317	100	105,26
11	November	851	883	883	100	105,26
12	Desember	790	838	838	100	105,26
RATA-RATA					100	105,26

2. Kalibrasi

No	Bulan	Σ Alat Masuk	Σ Target Sert. Selesai	Tepat Waktu	%	Capaian Target 95 % per bulan
1.	Januari	392	448	448	100	105,26
2.	Februari	713	701	701	100	105,26
3.	Maret	547	567	567	100	105,26
4.	April	377	322	322	100	105,26
5.	Mei	462	392	392	100	105,26
6.	Juni	729	761	761	100	105,26
7.	Juli	787	790	790	100	105,26
8.	Agustus	605	558	558	100	105,26
9.	September	721	840	840	100	105,26
10.	Oktober	1045	931	931	100	105,26
11.	November	876	906	906	100	105,26
12.	Desember	705	729	729	100	105,26
RATA-RATA					100	105,26

3. Sertifikasi

No	Bulan	Rata-rata HK	Σ Keg	Tepat Waktu	%	Capaian Target 95 % per bulan
1.	Januari	7	55	55	100	105,26
2.	Februari	5	17	17	100	105,26
3.	Maret	6	47	47	100	105,26
4.	April	7	47	47	100	105,26
5.	Mei	7	21	21	100	105,26
6.	Juni	5	69	69	100	105,26
7.	Juli	6	112	112	100	105,26
8.	Agustus	6	34	34	100	105,26
9.	September	6	29	29	100	105,26
10.	Oktober	7	41	41	100	105,26
11.	November	7	44	44	100	105,26
12.	Desember	7	50	50	100	105,26
RATA-RATA					100	105,26

4. Inspeksi Teknis

No	Bulan	Σ Titik Proses	Σ Target Sert Selesai	Tepat Waktu	%	Capaian Target 95 % per bulan
1.	Januari	17	31	31	100	105,26
2.	Februari	37	2	2	100	105,26
3.	Maret	18	49	49	100	105,26
4.	April	31	21	21	100	105,26
5.	Mei	15	10	10	100	105,26
6.	Juni	48	28	28	100	105,26
7.	Juli	21	60	60	100	105,26
8.	Agustus	28	19	19	100	105,26
9.	September	-	12	12	100	105,26

No	Bulan	Σ Titik Proses	Σ Target Sert Selesai	Tepat Waktu	%	Capaian Target 95 % per bulan
10	Oktober	9	14	14	100	105,26
11	November	8	24	24	100	105,26
12	Desember	6	14	14	100	105,26
RATA-RATA					100	105,26

b) Kendala

Adanya kebijakan efisiensi anggaran mengakibatkan kegiatan sempat terhenti sementara

c) Rekomendasi/Tindak Lanjut

Evaluasi dari pelaksanaan kegiatan ini realisasi penyelesaian layanan sampai dengan Triwulan IV 2025 secara umum masih memenuhi target, namun tetap perlu dilakukan monitoring penyelesaian pekerjaan yang bisa dimonitoring melalui SIL.

Rencana perbaikan

- melakukan penyesuaian pelaksanaan kegiatan
- memonitoring proses layanan pengujian jika ada keterlambatan segera diselesaikan dan memberitahukan informasi tersebut kepada pelanggan. Disamping itu, untuk mendukung kelancaran operasional layanan pengujian agar turut dilakukan upaya pemeliharaan mesin peralatan berkala, evaluasi ketersediaan stock bahan kimia dan sparepart secara berkala.

2) Nilai *Net Promoter Score* (NPS)

a) Hasil yang telah dicapai dan analisis capaian kinerja

Net Promoter Score (NPS) adalah metode untuk mengukur loyalitas pelanggan terhadap suatu perusahaan dan seberapa besar kemungkinan mereka untuk merekomendasikan produk atau layanan tersebut kepada orang lain. NPS diukur dengan mengajukan pertanyaan tunggal kepadapelanggan: “Seberapa besar kemungkinan Anda merekomendasikan Balai/produk/layanan kami kepada teman atau kolega?” Pelanggan diminta untuk menjawab pada skala 0 hingga 10. Kategorisasi responden terdiri dari 3 kategori yaitu:

- *Promoters* (9-10): Pelanggan yang sangat puas dan cenderung merekomendasikan perusahaan kepada orang lain.
- *Passives* (7-8): Pelanggan yang cukup puastetapi tidak cukup antusias untuk

menjadi promotor.

- *Detractors* (0-6): Pelanggan yang tidak puas dan mungkin memberikan ulasan negatif atau tidak merekomendasikan perusahaan.

NPS dihitung dengan mengurangi persentase *Detractors* dari persentase *Promoters*:

$$NPS = \% Promoters - \% Detractors$$

Setelah dilakukan perhitungan NPS dari pelanggan yang menggunakan jasa layanan pengujian, kalibrasi, sertifikasi, pelatihan, inspeksi teknis, dan verifikasi TKDN pada periode hingga Desember 2025 maka nilai NPS pelanggan BBSPJIA pada bulan Oktober hingga Desember 2025 adalah **72,99**. Artinya pengguna jasa industri (pelanggan BBSPJIA) **sangat puas** dan **cenderung merekomendasikan** layanan BBSPJIA kepada orang lain. Detil nilai NPS pelanggan per jasa layanan dapat dilihat pada Tabel 1 di bawah ini:

Tabel 3.5. Net Promotor Score (NPS) Triwulan IV

Jasa Layanan	Σ	Net Promotor Score (NPS)	% Promoters (skor 9-10)	% Passives (skor 7-8)	% Detractors (skor 0-6)
Pengujian	285	68.42	70.88	26.67	2.46
Kalibrasi	75	70.67	72.00	26.67	1.33
Sertifikasi	48	79.17	81.25	16.67	2.08
Pelatihan	378	59.79	62.43	34.92	2.65
Konsultasi	10	70.00	70.00	30.00	0.00
Inspeksi Teknis	26	80.77	80.77	19.23	0.00
Verifikasi TKDN	9	100.00	100.00	0.00	0.00
Uji Profisiensi	49	55.10	61.22	32.65	6.12
Jumlah responden	880	72.99	74.82	23.35	1.83

b) Kendala

1. Belum stabilnya tingkat respons
2. Bias dalam pengisian survei
3. Kurangnya pemahaman pelanggan terhadap NPS
4. Hambatan teknis dalam pengumpulan data

b) Rekomendasi/Tindak Lanjut

Evaluasi dari kegiatan ini adalah jumlah sampel kuesioner NPS yang diterima masih belum memenuhi/mencerminkan populasi jumlah pelanggan yang dilayani sampai dengan Triwulan IV 2025 sehingga perlu dilakukan strategi untuk menghimpun pengisian kuesioner yang umpan baliknya dapat langsung diterima atau kembali ke BBSPJIA seperti misalnya dengan menysasar pelanggan yang datang langsung ke

BBSPIA agar dapat langsung melakukan pengisian form kuesioner yang telah disampaikan petugas layanan.

Rencana Perbaikan:

1. Perlunya komunikasi yang persuasif kepada pelanggan untuk mengisi kuesioner, dan mensosialisasikan terkait penilai tersebut terhadap kredibilitas instansi
2. Memonitor jumlah pengisian kuesioner, jika terdapat pelanggan yang belum mengisi maka petugas akan mengirimkan kuesioner ulang melalui aplikasi *whatsapp*

3) Sasaran Kegiatan II: Terwujudnya layanan jasa industri yang mandiri

Sasaran Strategis (SS)	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Realisasi	Capaian	Sampai dengan Triwulan IV				
						% Fisik		Rencana Kegiatan	Realisasi	
						Target	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Terwujudnya layanan jasa industri yang mandiri	1	Indeks peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	1	Indeks	2	200 %	100	100	Mengidentifikasi utilisasi layanan jasa industri di dalam negeri yang meliputi, rancang bangun dan perekayasaan di bidang industri, standardisasi dan sertifikasi, pengujian, kalibrasi serta pelatihan teknis	Mengidentifikasi utilisasi layanan jasa industri di dalam negeri yang meliputi, rancang bangun dan perekayasaan di bidang industri, standardisasi dan sertifikasi, pengujian, kalibrasi serta pelatihan teknis
	2	Jumlah hasil layanan jasa industri	20.600	Hasil Layanan	23.090	112,09 %	100	100	Mengidentifikasi utilisasi layanan jasa industri di dalam negeri yang meliputi, rancang bangun dan perekayasaan di bidang industri, standardisasi dan sertifikasi, pengujian, kalibrasi serta pelatihan teknis	Mengidentifikasi utilisasi layanan jasa industri di dalam negeri yang meliputi, rancang bangun dan perekayasaan di bidang industri, standardisasi dan sertifikasi, pengujian, kalibrasi serta pelatihan teknis
	3	Nilai <i>Revenue on Asset</i> (RoA)	8,40	Persen	8,85	105,36 %	100	100	Melakukan perhitungan nilai RoA triwulan IV	Melakukan perhitungan nilai RoA triwulan IV
	4	Rasio Pendapatan Operasional terhadap Biaya Operasional (POBO)	75,00	Persen	81,36	108,48 %	100	100	Melakukan perhitungan nilai rasio POBO Triwulan IV	Melakukan perhitungan nilai rasio POBO Triwulan IV

Sasaran Strategis II mempunyai Indikator Kinerja:

1) Indeks peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Salah satu tugas dan fungsi yang dilaksanakan oleh UPT adalah kegiatan pelayanan jasa industri yang meliputi inspeksi teknik, sertifikasi, pengujian, kalibrasi, pelatihan teknis dan layanan jasa industri lainnya. Realisasi target PNBP tersebut perlu diukur peningkatannya setiap tahun sebagai landasan kinerja UPT BSKJI. Melalui peningkatan PNBP layanan jasa industri yang diselenggarakan UPT di lingkungan BSKJI diharapkan peran BSKJI dalam mendukung penerapan kebijakan standarisasi industri dapat semakin luas dan dapat mewujudkan layanan jasa industri yang mandiri

a) Hasil yang telah dicapai dan analisis capaian kinerja

Pada triwulan IV tahun 2025 jumlah penerimaan PNBP BBSPJIA adalah sebesar Rp 32.650.692.572,- sedangkan target PNBP pada tahun 2024 adalah sebesar Rp 29.800.000.000,-. Pada bulan Desember 2025, telah dilakukan revisi indikator kinerja dimana indikator kinerja mengalami perubahan redaksional menjadi indeks peningkatan PNBP.

Adapun cara perhitungannya adalah sebagai berikut:

- 1) Menghitung persentase peningkatan PNBP dengan menghitung selisih jumlah PNBP pada tahun ke-n (B) dan target PNBP pada tahun 2024 sebagai *baseline* (A) dibagi A dikalikan 100%

$$\text{Persentase Peningkatan PNBP} = \frac{(B - A)}{A} \times 100\%$$

$$\text{Persentase Peningkatan PNBP} = \frac{(32.650.692.572 - 29.800.000.000)}{A} \times 100\%$$

$$\text{Persentase Peningkatan PNBP} = 9,5 \%$$

- 2) Indeks ditentukan berdasarkan *range* persentase peningkatan PNBP sebagai berikut:

Indeks	Range Peningkatan PNBP
1	$\leq 5\%$
2	$5 < x \leq 20$
3	$20 < x \leq 50$
4	$50 < x \leq 100$
5	> 100

Dari tabel diatas diperoleh bahwa indeks peningkatan PNPB BBSPJIA Tahun 2025 ada di indeks 2. Realisasi ini mencapai 200% dari target yaitu indeks 1.

Adapun rincian pendapatan per jasa layanan BBSPJIA sampai dengan bulan Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.6. Rincian Pendapatan per Jenis Layanan BBSPJIA Triwulan IV

NO	Jasa Layanan	TARGET 2025	Realisasi per 31 Desember 2025	Realisasi per 31 Desember 2024	Pertumbuhan (Rp)	% Pertumbuhan
1	Pengujian	13,300,000,000	14,370,184,850	13,258,334,675	1,111,850,175	8.39%
2	Kalibrasi	3,000,000,000	2,787,828,950	2,714,337,850	73,491,100	2.71%
3	Sertifikasi	8,600,000,000	7,521,155,000	8,509,182,000	- 988,027,000	-11.61%
4	Sampling	550,000,000	355,930,000	512,020,000	- 156,090,000	-30.49%
5	Uji Profisiensi	1,500,000,000	1,549,088,400	1,469,520,000	79,568,400	5.41%
6	Bimbingan dan pendampingan teknis industri	1,230,000,000	1,245,150,500	1,885,619,200	- 640,468,700	-33.97%
7	Konsultansi	400,000,000	413,400,000	426,178,600	- 12,778,600	-3.00%
8	Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Industri	100,000,000	7,997,100	4,597,414,993	- 4,589,417,893	-99.83%
9	Inspeksi Teknis	1,400,000,000	1,204,580,000	1,402,925,000	- 198,345,000	-14.14%
10	TKDN dan GRK	250,000,000	1,609,190,500	N/A	N/A	N/A
11	Pemeriksa Halal	85,000,000	27,827,500	N/A	N/A	N/A
12	Penyedia Bahan Acuan dan Uji Masa Simpan	20,000,000	52,000,000	N/A	N/A	N/A
13	Jasa Bank	450,000,000	387,249,317	463,933,263	- 76,683,946	-16.53%
14	Penggunaan Tenaga Ahli Dan Penerimaan Kunjungan	100,000,000	62,394,400	119,773,268	- 57,378,868	-47.91%
15	Penggunaan Lahan. Gedung Dan Ruangan	40,000,000	115,230,000	58,200,000	57,030,000	97.99%
16	Penggunaan Peralatan dan Mesin	240,000,000	229,734,800	234,890,000	- 5,155,200	-2.19%
17	Jasa lainnya	40,000,000	711,751,255	1,052,304,979	- 340,553,724	-32.36%
	Total Penerimaan	31,305,000,000	32,650,692,572	36,704,633,828	- 4,053,941,256	-11.04%

b) Kendala

- Beberapa peralatan laboratorium mengalami kerusakan seperti TOC meter, Karl fischer (sehingga harus sub kontrak pengujian ke lab lain) AAS GTA, ruang asam berpengaruh terhadap kapasitas laboratorium
- Keterbatasan peralatan pendukung mikrobiologi seperti : membran filtrasi, dan tabung uji

c) Tindak Lanjut

Evaluasi dari pelaksanaan kegiatan ini adalah diperlukan peningkatan penerimaan PNBPN dari seluruh layanan jasa BBSPJIA (tidak hanya terpaku penerimaan dari layanan utama), perlunya monitoring setiap bulan pihak manajemen terkait kendala ataupun realisasi inovasi baik dari segi layanan, proses maupun penyelesaian keuangan terkait progres penagihan.

Rencana Perbaikan:

- Pengadaan dan perbaikan infrastruktur standardisasi
- BBPSJIA perlu mengembangkan layanan lain untuk mencapai target penerimaan PNBPN BLU yang telah ditetapkan

2) Jumlah hasil layanan jasa industri

a) Hasil yang telah dicapai dan analisis capaian kinerja

Salah satu tugas dan fungsi yang dilaksanakan oleh UPT adalah kegiatan pelayanan jasa industri yang meliputi inspeksi teknik, sertifikasi, pengujian, kalibrasi, pelatihan teknis dan layanan jasa industri lainnya.

Pada Triwulan IV TA. 2025, realisasi jumlah hasil layanan jasa industri yang digunakan oleh pelanggan BBPSJIA mencapai 23.090 layanan jasa atau 112,09% dari target 20.600 layanan jasa. Rincian realisasi volume per jasa layanan pada Tabel 3.7, sebagai berikut:

Tabel 3.7 Realisasi Volume Layanan BBPSJIA Triwulan IV TA. 2025

No.	Jenis Layanan	TW IV TA 2025		
		Target	Realisasi	Persentase
1	Pengujian	10.341	11.501	111.22%
2	Kalibrasi	7.519	7.959	105.85%
3	Sertifikasi	721	767	106.38%
4	Sampling	299	267	89.30%
5	Uji Profisiensi	731	803	109.85%
6	Bimbingan dan pendampingan teknis industri	848	1539	181.49%
7	Konsultasi	10	12	120.00%
8	Optimalisasi pemanfaatan teknologi industri	6	4	66.67%
9	Inspeksi Teknis	125	238	190.40%
	Total	20,600	23.745	112.09%

b) Kendala

Kendala yang dihadapi antara lain persaingan dengan lembaga sejenis terutama dengan Laboratorium/Perusahaan swasta semakin ketat

c) Tindak lanjut

Evaluasi dari pelaksanaan kegiatan ini diperlukan pendekatan kembali kepada pelanggan yang beralih dari BBSPJIA dengan tetap mendorong upaya peningkatan kapasitas layanan dan kualitas layanan.

Rencana Perbaikan:

Meningkatkan kualitas terutama waktu layanan (*delievery time*) agar dapat bersaing dengan kompetitor.

3) Nilai Revenue on Asset (RoA)**a) Hasil yang telah dicapai dan analisis capaian kinerja**

Revenue on Asset (RoA) adalah rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur seberapa efisien sebuah perusahaan dalam menghasilkan pendapatan dari aset yang dimilikinya. Rasio ini menunjukkan seberapa banyak pendapatan yang dihasilkan perusahaan untuk setiap unit aset yang dimiliki.

Kegiatan yang dilakukan selama Triwulan IV adalah:

1. Melakukan monitoring penerimaan BLU bulan Oktober-Desember 2025
2. Melakukan pengesahan penerimaan periode Oktober-Desember 2025
3. Melakukan pemutakhiran nilai buku aset satuan kerja Oktober-Desember 2025

Pada triwulan IV 2025, nilai *Revenue on Asset* (RoA) BBSPJIA dapat dipaparkan sebagai berikut:

Penerimaan PNPB (per tanggal 31 Desember) = Rp 32.650.692.572,-

Nilai aset BBSPJIA (Tahun 2024) = Rp 369,124,135,766,-

$$\text{Nilai RoA} = \frac{\text{Penerimaan PNPB}}{\text{Nilai Asset}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio RoA} = \frac{32.650.692.572}{369,124,135,766} \times 100\%$$

Rasio RoA = 8.85 %

b) Kendala

Tidak ada kendala yang berarti

c) Rekomendasi/Tindak lanjut

Evaluasi dari pelaksanaan kegiatan ini adalah belum seluruh aset tetap yang dimiliki khususnya aset bangunan dan mesin peralatan dioptimalkan untuk mendorong peningkatan penerimaan.

Rencana perbaikan yaitu dengan melakukan monitoring penerimaan dan pemutakhiran nilai buku aset satuan kerja dilaksanakan sesuai prosedur dan tepat.

4) Rasio Pendapatan Operasional terhadap Biaya Operasional (POBO)**a) Hasil yang telah dicapai dan analisis capaian kinerja**

Pendapatan Operasional terhadap Beban Operasional (POBO) adalah rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur seberapa baik suatu UPT dalam menghasilkan pendapatan dari aktivitas operasionalnya dibandingkan dengan biaya atau beban yang harus dikeluarkan untuk menjalankan operasionalnya. Rasio ini menunjukkan efisiensi operasional perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dari aktivitas intinya

Rasio POBO digunakan dalam mengukur kemandirian UPT atas operasional layanannya dari beban operasional yang telah dikeluarkan untuk layanan publik, sering disebut juga sebagai rasio kemandirian UPT.

Kegiatan yang dilakukan selama triwulan IV adalah:

1. Melakukan monitoring penerimaan BLU bulan Oktober-Desember 2025.
2. Melakukan pengesahan penerimaan dan belanja BLU periode Oktober-Desember 2025.

Untuk triwulan IV 2025, nilai POBO BBSPJIA dapat diuraikan sebagai berikut :

Penerimaan PNBPN (per tanggal 30 Desember) = Rp 32.650.692.572,-

Biaya operasional selama Januari – Desember = Rp 40.130.521.438-

$$\text{Rasio POBO} = \frac{\text{Penerimaan PNBPN}}{\text{Biaya operasional}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio POBO} = \frac{32.650.692.572}{40.130.521.438} \times 100\%$$

$$\text{Rasio POBO} = 81.36 \%$$

b) Kendala

Tidak ada kendala yang berarti

c) Rekomendasi/Tindak lanjut

Evaluasi dari pelaksanaan kegiatan ini adalah memonitoring capaian nilai Pendapatan Diterima di Muka (PDDM) setiap bulan.

Rencana perbaikan adalah segera menyelesaikan pekerjaan yang menjadi PDDM.

4) Sasaran Kegiatan III: Terwujudnya SDM yang profesional.

Sasaran Strategis (SS)	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Realisasi	Capaian	Sampai dengan Triwulan IV			
						% Fisik		Rencana Kegiatan	Realisasi
						Target	Ralisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Terwujudnya SDM yang profesional	1 Indeks Profesionalitas ASN (IPASN)	81,3	Indeks	82,68	101,7 %	100	100	Melaksanakan pelatihan/diklat peningkatan kompetensi Pegawai sesuai dengan kebutuhan, dan memantau tingkat disiplin pegawai	Melaksanakan inhouse training dan juga mengirimkan pegawai untuk mengikuti pelatihan eksternal

Sasaran Kegiatan III terdiri dari 1 (satu) Indikator Kinerja:

1) Indeks profesionalitas ASN (IPASN)

a) Hasil yang telah dicapai dan analisis capaian kinerja

Adapun rencana kegiatan triwulan IV adalah:

1. Koordinasi dan penyusunan rencana diklat teknis dan diklat struktural
2. Pelaksanaan *workshop*/bimtek/seminar/*webinar* untuk mendukung peningkatan kompetensi untuk seluruh pegawai
3. Pengumpulan bukti peningkatan kompetensi SDM berkala
4. Evaluasi pelaksanaan peningkatan kompetensi SDM TW IV.

Realisasi fisik dari kegiatan tersebut adalah :

1. Evaluasi rencana dan Realisasi peningkatan kompetensi SDM sesuai kebutuhan organisasi dan ketersediaan anggaran
2. Pembaruan Data Pelatihan dan Pendidikan Pegawai
3. Fasilitasi Diklat Teknis/ Workshop/ Bimtek/ Sosialisasi

Untuk tahun 2025, hasil perhitungan rata-rata indeks profesionalitas ASN BBSPJIA mencapai nilai 82,68. Hasil ini bersumber dari rekapitulasi nilai IPASN yang ada pada *website intranew* Kementerian Perindustrian.

Realisasi ini mencapai 101,70 % dari yang ditargetkan nilai IPASN sebesar nilai 81,30.

b) Kendala

Tidak ada kendala berarti

c) Rekomendasi

Evaluasi dari pelaksanaan ini adalah melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelatihan dengan rencana pelatihan 2025 dan juga evaluasi nilai indeks profesionalitas ASN setiap periodik sehingga di akhir tahun dapat mencapai target perjakin yang ditetapkan.

Rencana perbaikan adalah :

1. Mengoptimalkan *inhouse training* dan pelatihan daring untuk pelatihan teknis/
Workshop/ Bimtek/ Sosialisasi
2. Mengevaluasi capaian peningkatan kompetensi pegawai yang telah diklat
3. Melakukan simulasi *progress* perhitungan IPASN yang telah dicapai

5) Sasaran Kegiatan IV: Penguatan sistem informasi terintegrasi dan pelayanan publik

Sasaran Strategis (SS)	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Realisasi	Capaian	Sampai dengan Triwulan IV				
						% Fisik		Rencana Kegiatan	Realisasi	
						Target	Ralisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Penguatan sistem informasi terintegrasi dan pelayanan publik	1	Persentase jenis layanan yang datanya terintegrasi dengan sistem informasi BSKJI	20,00	Persen	20,00	100	100	100	Persiapan dan Koordinasi dengan Sekretariat BSKJI	Persiapan dan Koordinasi dengan Sekretariat BSKJI
	2	Tingkat Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	77	Persen	78,30	101,69	100	100	Perhitungan dan evaluasi tingkat SPBE Triwulan	Perhitungan dan evaluasi tingkat SPBE Triwulan IV
	3	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	4,20	Indeks	4,35	103,57	100	100	Melakukan pelayanan sesuai SPM	Melakukan pelayanan sesuai SPM

Sasaran Kegiatan IV terdiri dari 3 (tiga) Indikator Kinerja

1. Persentase jenis layanan yang datanya terintegrasi dengan sistem informasi BSKJI

a) Hasil yang telah dicapai dan analisis capaian kinerja

Integrasi data dalam layanan jasa industri sangat penting karena memungkinkan aliran informasi yang lebih lancar, koordinasi yang lebih baik, serta pengambilan keputusan yang lebih cepat dan tepat. Dalam dunia industri yang semakin kompleks dan terhubung secara digital, integrasi data menjadi kunci untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan inovasi

Sampai dengan Triwulan IV TA. 2025, hasil perhitungan jenis layanan yang datanya terintegrasi dengan sistem informasi BSKJI masih dalam proses

b) Kendala

Tidak ada.

c) Rekomendasi/Tindak Lanjut

Evaluasi dari pelaksanaan kegiatan ini adalah koordinasi intensif dengan BSKJI terkait respon sistem SIPPT.

Rencana perbaikan di triwulan selanjutnya adalah Melakukan konsultasi dengan admin SIPPT BSKJI melalui forum grup integrasi data BSJKI agar dapat memberikan solusi untuk pengiriman data yang tertunda atau tidak dapat di terima pada sisi server SIPPT.

2. Tingkat Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

a) Hasil yang telah dicapai dan analisis capaian kinerja

Sehubungan dengan diterapkannya Keputusan Menteri Perindustrian No. 2343 Tahun 2024 tentang Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Kementerian Perindustrian, maka roadmap yang telah ditetapkan harus segera ditindaklanjuti.. Secara umum, kegiatan terkait SPBE yang telah dilakukan hingga Triwulan IV adalah sebagai berikut :

No	Tanggal	Aktivitas	Keterangan
1	21 Februari 2025	Pengajuan akun Lemari Online untuk BBSPJIA	Telah aktif untuk menyimpan data dukung capaian SPBE
2	11 Maret 2025	Mengikuti rapat konsultasi anggaran	Perlu membuat permohonan kegiatan

No	Tanggal	Aktivitas	Keterangan
		SPBE	yang akan di clearance
3	18 Maret 2025	Mengikuti rapat konsultasi aplikasi SPBE	Mengkonfirmasi aplikasi yang akan dipilih untuk dilaporkan dokumentasi tahapan pengembangannya

Pada tanggal 2 Januari 2026, Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kementerian Perindustrian telah mengirimkan Nota Dinas Nomor 2/SJ-IND.7/TIK/I/2026 tentang Hasil Akhir Penilaian Perkin SPBE Tahun 2025, dimana penilaian Tingkat Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) untuk satuan kerja BBSPJIA memperoleh nilai 78,30.

Realisasi ini mencapai 101,69% dari nilai SPBE yang ditargetkan sebesar nilai 77.

b) Kendala

Pemenuhan bukti dukung dalam pengisian LKE SPBE belum ada panduan baku berupa juknis yang memudahkan dalam penyusunan bukti dukung implementasi SPBE

c) Rekomendasi/Tindak Lanjut

Evaluasi dari pelaksanaan kegiatan ini adalah berkoordinasi baik secara internal maupun eksternal terkait pemenuhan bukti dukung SPBE.

Rencana perbaikan selanjutnya adalah melakukan diskusi, bimbingan serta mengikuti kegiatan yang terkait SPBE dengan Pusdatin dalam rangka memahami pemenuhan bukti dukung pada pengisian LKE.

3. Indeks Pelayanan Publik (IPP)

a) Hasil yang telah dicapai dan analisis capaian kinerja

Indeks Pelayanan Publik adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di Indonesia berdasarkan Aspek Kebijakan Pelayanan, Aspek Profesionalisme SDM, Aspek Sarana Prasarana, Aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik, Aspek Konsultasi dan Pengaduan serta Aspek Inovasi.

Pada tanggal 18 Desember 2025, Sekretariat BSKJI telah mengirimkan Nota Dinas nomor 5685/BSKJI.1/LP/XII/2025 tentang penyampaian nilai akhir pelaksanaan

PEKPPP Mandiri di lingkungan BSKJI, dimana indeks pelayanan publik BBSPJIA memperoleh hasil PEKPPP sebesar 4,35, Nilai A- dan kategori Sangat Baik.

Realisasi Nilai Indeks Pelayanan Publik 4,35 ini, melebihi dari yang ditargetkan sebesar 4,20 dengan capaian sebesar 103,57%.

b) Kendala

Tim penilai PEKPPP mandiri dari Sekretariat BSKJI kurang komunikatif pada saat penilaian sehingga menyulitkan tim BBSPJIA dalam memenuhi data dukung yang diperlukan.

b) Rekomendasi

Evaluasi dari kegiatan ini adalah meningkatkan koordinasi dengan Sekretariat BSKJI dalam proses penilaian indeks pelayanan publik berikutnya.

Rencana tindak lanjut:

- Memelihara penyampaian informasi dan pelayanan kehumasan kepada pelanggan tersampaikan dengan baik dan benar
- Penyampaian informasi dan pelayanan kehumasan melalui semua media di BBSPJIA (elektronik dan non elektronik)
- Menindaklanjuti keluhan pelanggan/ pengaduan/ saran dan masukan yang muncul dari pelayanan

6. Sasaran kegiatan V: Tercapainya pengawasan internal yang efektif dan efisien

Sasaran Strategis (SS)	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Realisasi	Capaian	Sampai dengan Triwulan IV				
						% Fisik		Rencana Kegiatan	Realisasi	
						Target	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Tercapainya pengawasan internal yang efektif dan efisien	1	Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh Satker	60	Persen	100	166,67%	100	100	Mengoptimalkan fungsi SPI secara independen	Mengoptimalkan fungsi SPI secara independen
	2	Nilai minimal hasil pengawasan kearsipan internal (Unit Kearsipan)	85,00	Nilai	89,50	105,29%	100	100	Pengelolaan kearsipan internal merujuk pada unit kearsipan sesuai peraturan ANRI Nomor 8 Tahun 2019	Pengelolaan kearsipan internal merujuk pada unit kearsipan sesuai peraturan ANRI Nomor 8 Tahun 2019

1) Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh Satker

a) Hasil yang telah dicapai dan analisis capaian kinerja

Pengawasan internal yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal dilakukan setiap tahun sebagai kontrol atas pelaksanaan kegiatan maupun anggaran agar tetap berada dalam koridor aturan maupun kinerja yang telah ditetapkan. Setiap tahun hasil pengawasan ini dituangkan dalam laporan hasil pengawasan internal dimana terdapat rekomendasi yang harus ditindaklanjuti, dan Satker diharapkan dapat responsif melakukan tindak lanjut atas rekomendasi dimaksud.

Pada tanggal 3-7 Maret 2025. Tim APIP dari Inspektorat III telah melaksanakan audit kinerja di BBSPJIA.

BBSPJIA telah menyampaikan rencana aksi tindak lanjut hasil pengawasan kepada Inspektorat Jenderal pada tanggal 17 Maret 2025.

Pada tanggal 30 September 2025, pihak Inspektorat Jenderal telah mengirimkan surat tentang Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Internal pada BBSPJIA TA 2024 dimana pihak Inspektorat Jenderal menyampaikan bahwa dari hasil temuan hasil pemeriksaan sebanyak 4 (empat) temuan dan 6(enam) saran, BBSPJIA telah menindak lanjuti seluruh hasil pemeriksaan dan dinyatakan selesai, sesuai dengan program dan keuangan yang telah diaudit.

Dari yang ditargetkan sebesar 60 persen maka realisasi ini mencapai 166,67 persen.

**INSPEKTORAT JENDERAL**

Jalan Widya Chandra VIII No.34, Senayan, Kebayoran Baru,
Kota Jakarta Selatan, 12190

Nomor : R/149 /IJ-IND/PW/IX/2025 Jakarta, 30 September 2025
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Penyelesaian Tindak Lanjut
Hasil Pengawasan Internal
pada Balai Besar
Standardisasi dan Pelayanan
Jasa Industri Agro Tahun
Anggaran 2024

Yth.

Kepala Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan
Jasa Industri Agro
di -
Bogor

Sehubungan dengan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian Nomor R/38/IJ-IND/PW/III/2025 tanggal 25 Maret 2025 Perihal Ikhtisar Hasil Audit Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Agro TA 2024, dengan ini kami sampaikan bahwa Saudara telah menindaklanjuti hasil pemeriksaan yang dilakukan.

Adapun temuan hasil pemeriksaan tersebut sebanyak 4 (empat) temuan dan 6 (enam) saran pada Tahun Anggaran 2024, seluruhnya telah ditindaklanjuti dan kami dapat menyatakan selesai sesuai dengan lingkup program dan keuangan yang telah diaudit (Rekapitulasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan terlampir).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

INSPEKTUR JENDERAL,

M. RUM

Tembusan:

1. Kepala BSKJI;
2. Sekretaris Inspektorat Jenderal;
3. Inspektur III;
4. Inspektur Investigasi.

) Kendala

Tidak ada kendala yang berarti.

c) Rekomendasi

Evaluasi dari kegiatan ini yaitu BBPSJIA akan terus berkordinasi dengan pihak Inspektorat Jenderal dalam kegiatan pemeriksaan/audit

Rencana perbaikan selanjutnya adalah:

1. Koordinasi dengan masing-masing Penanggung Jawab untuk menindaklanjuti hasil temuan sesuai rekomendasi
2. Monitoring penyelesaian tindak lanjut yang belum sesuai rekomendasi
3. Penyampaian dan koordinasi penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan pada satker BBSPJIA dengan pihak Inspektorat Jenderal sesuai batas waktu yang ditetapkan

2) Nilai minimal hasil pengawasan kearsipan internal (Unit Kearsipan)**a) Hasil yang telah dicapai dan analisis capaian kinerja**

Pada triwulan III tahun 2025, telah dilakukan pengawasan kearsipan internal oleh Tim Pengawas dari Biro Umum Kemenperin pada tanggal 11 September 2025. Setelah dilakukan pengawasan, ditemukan beberapa ketidaksesuaian dengan Peraturan-peraturan terkait Kearsipan sehingga diberikan waktu selama 7 hari kerja untuk dilakukan perbaikan. Perbaikan telah selesai dilakukan oleh Tim Kearsipan BBSPJIA dan telah disampaikan pada tanggal 23 September 2025 kepada Tim Pengawas dari Biro Umum Kemenperin.

Pada tanggal 18 Desember 2025, Kepala Biro Umum telah mengirimkan Nota Dinas Nomor 855/SJ-IND.6/KR/XII/2025 tentang Penyampaian Pengumuman Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Internal Pada Unit Kearsipan dan Unit Pengolah Satuan Kerja Daerah Tahun 2025, dimana BBSPJIA memperoleh nilai 89,50 untuk Unit Kearsipan. Realisasi ini mencapai 105,29 % dari yang ditargetkan sebesar nilai 85,00

PENGUMUMAN
NOMOR 55 /SJ-IND/KR/XII/2025
TENTANG
NILAI HASIL PENGAWASAN KEARSIPAN INTERNAL
PADA UNIT KEARSIPAN DAN UNIT PENGOLAH SATUAN KERJA DAERAH
TAHUN 2025

NO	NAMA OBJEK PENGAWASAN	NILAI SETELAH VERIFIKASI
A	Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri (BBSPJI)	
1	BBSPJI Kimia, Farmasi, dan Kemasan- Jakarta (UK)	89.40
2	BBSPJI Kimia, Farmasi, dan Kemasan- Jakarta (UP)	65.27
3	BBSPJI Agro Bogor (UK)	89.50
4	BBSPJI Agro Bogor (UP)	90.25
5	BBSPJI Keramik dan Mineral Nonlogam Bandung (UK)	93.67
6	BBSPJI Keramik dan Mineral Nonlogam Bandung (UP)	89.62
7	BBSPJI Selulosa Bandung (UK)	92.90

b) Kendala

Tidak ada kendala yang berarti

c) Rekomendasi/Tindak Lanjut

Evaluasi dari pelaksanaan kegiatan ini adalah pelaksanaan pengelolaan arsip dinamis pada unit kearsipan BBSPJIA telah dijalankan diantaranya dengan telah dilakukannya upaya pengendalian

naskah dinamis, pengelolaan terkait penggunaan, pemeliharaan dan penyusutan arsip. Namun demikian, masih diperlukan peningkatan kompetensi SDM khususnya menyangkut pengoperasian aplikasi persuratan Srikandi dalam mendukung pencapaian target pengawasan kearsipan internal.

Rencana perbaikan untuk triwulan selanjutnya adalah penyesuaian pedoman dan target kinerja kearsipan, serta perlu koordinasi ke Biro Umum sebagai UK(Unit Kearsipan) 1 terkait mengenai kearsipan serta menjajaki ketersediaan pelatihan/Bimtek terkait kearsipan untuk peningkatan kompetensi SDM arsiparis BBSPJIA.

7. Sasaran Kegiatan VI: Terwujudnya akuntabilitas organisasi

Sasaran Strategis (SS)	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Realisasi	Capaian	Sampai dengan Triwulan IV				
						% Fisik		Rencana Kegiatan	Realisasi	
						Target	Ralisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Terwujudnya Akuntabilitas Organisasi	1	Nilai minimal Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Satker	79,90	Nilai	83,00	103,88%	100	100	Menyusun dokumen AKIP sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu serta diarsipkan dengan baik	Menyusun dokumen AKIP sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu serta diarsipkan dengan baik
	2	Nilai minimal Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	95,00	Nilai	97,14	102,25%	100	100	Menginput pemutakhiran perencanaan dan pelaporan anggaran secara tepat waktu	Menginput pemutakhiran perencanaan dan pelaporan anggaran secara tepat waktu
	3	Penilaian dan Analisis Laporan Keuangan	75	Nilai	93,00	124%	100	100	Pengelolaan Keuangan sesuai aturan yang berlaku	Pengelolaan Keuangan sesuai aturan yang berlaku

Sasaran Strategis VI terdiri dari 3 (tiga) Indikator Kinerja:

1) Nilai minimal Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Satker

a) Hasil yang telah dicapai dan analisis capaian kinerja

Kegiatan penilaian SAKIP Tahun 2024 di lingkungan BSKJI telah dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal Kemenperin pada bulan Maret 2025 dan untuk sementara hasil penilaian dari tim APIP menyatakan BBSPJIA mendapatkan nilai 83,00 dengan predikat A. Realisasi ini jika dibandingkan dengan target sebesar 79.90 maka capaiannya sebesar 104 %/. Apabila dibandingkan dengan nilai SAKIP BBSPJIA Tahun 2023 yaitu 79,85 maka ada peningkatan sebesar 4%.

Hasil Evaluasi SAKIP BBSPJIA Tahun 2025

II. Unit kerja BBSPJI dan BSPJI

No.	Unit Kerja	Perencanaan Kinerja	Pengukuran Kinerja	Pelaporan Kinerja	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	Total	Predikat
1.	BBSPJIKFK	26,70	28,50	13,05	20,00	88,25	A
2.	BBSPJIA	25,20	25,50	12,30	20,00	83,00	A
3.	BBSPJIKMN	25,20	25,50	13,05	20,00	83,45	A
4.	BBSPJIT	24,60	25,50	12,30	20,00	82,40	A
5.	BBSPJIBBT	26,70	27,60	13,05	20,00	87,35	A
6.	BBSPJIS	25,20	24,00	12,30	20,00	81,50	A
7.	BBSPJILM	25,20	25,50	12,30	20,00	83,00	A
8.	BBSPJIKKP	26,70	26,10	12,30	20,00	85,10	A
9.	BBSPJIKB	26,70	25,20	12,30	20,00	84,20	A
10.	BBSPJPPI	25,20	26,10	12,30	20,00	83,60	A
11.	BBSPJI HPMLM	26,10	25,50	12,30	20,00	83,90	A
12.	BSPJI Aceh	26,10	27,60	12,30	20,00	86,00	A

b) Kendala

Adanya perubahan aturan penilaian yang bersifat lebih kompleks sehingga memerlukan penyesuaian dan tindak lanjut yang sangat mendalam

c) Rekomendasi

Evaluasi dari kegiatan ini adalah menindaklanjuti rekomendasi hasil penilaian SAKIP agar nilai tahun mendatang dapat meningkat.

Rencana Perbaikan yaitu mempersiapkan data yang digunakan jauh jauh hari dan melengkapinya untuk penilaian SAKIP tahun anggaran 2025 serta menyelesaikan rekomendasi tindak lanjut hasil evaluasi SAKIP tahun 2024.

2) Nilai minimal Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

Nilai minimal IKPA merupakan ambang batas terendah yang harus dicapai oleh satuan kerja dalam mengelola anggaran negara secara efektif, efisien, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. IKPA sendiri digunakan untuk mengukur kinerja pelaksanaan anggaran berbasis aspek kesesuaian perencanaan, efektivitas pelaksanaan, serta kepatuhan terhadap regulasi. Nilai minimal ini bertujuan untuk memastikan bahwa penggunaan anggaran

mendukung pencapaian output yang optimal serta menghindari potensi penyimpangan atau ketidakefisienan dalam pengelolaan keuangan negara

a) Hasil yang telah dicapai dan analisis capaian kinerja

Pada Triwulan IV target fisik dari indikator ini adalah 100 % dengan realisasi capaian sebesar 100 %.

Adapun rencana aksi kegiatan pada Triwulan IV meliputi:

1. Membuat rencana penarikan dana bulanan triwulan IV dan melakukan revisi pemutakhiran RPD Halaman III DIPA
2. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan realisasi belanja
3. Berkoordinasi dengan PPK terkait rencana pelaksanaan kegiatan di tiap triwulan
4. Memastikan agar pelaksanaan kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan

Pada triwulan IV TA. 2025, BBSPJIA memperoleh Nilai Minimal Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) sebesar 97,14 % dari yang ditargetkan sebesar 95 %. Dengan demikian capaian indikator kinerja ini mencapai 102,25 %



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BALAI BESAR INDUSTRI AGRO

INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : NOPEMBER

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurang)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output				
1	023	019	247136	BALAI BESAR STANDARISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI AGRO	Nilai	100.00	100.00	100.00	80.00	0.00	0.00	100.00	58.00	60%	0.00	96.67
					Bobot	10	15	0	10	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	0.00	8.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		100.00				100.00				

b) Kendala

Tidak ada kendala yang berarti

c) Rekomendasi

Evaluasi dari pelaksanaan kegiatan ini adalah berkenaan dengan pemenuhan aspek penilaian IKPA terkait kualitas perencanaan anggaran, telah dilakukan proses pemutakhiran RPD hal III DIPA pada Triwulan IV 2025 sesuai batas waktu ketentuan yang ditetapkan.

Rencana tindak lanjut adalah meningkatkan koordinasi dengan Tim Pengelola Keuangan BBSPJIA terkait penyesuaian data Rencana Penarikan Dana (RPD) setiap triwulan.

3) Penilaian dan Analisis Laporan Keuangan

a) Hasil yang telah dicapai dan analisis capaian kinerja

Penilaian dan Analisis Laporan Keuangan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Biro Keuangan untuk menilai ketepatan waktu, kesesuaian, kewajaran serta menganalisis akurasi serta keandalan Laporan Keuangan yang disusun oleh satuan kerja di lingkungan Kementerian Perindustrian. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan melalui proses evaluasi sistematis atas data keuangan, kesesuaian SAP, kecukupan informasi, efektifitas pengendalian intern serta ketaatan atas peraturan perundang-undangan.

Untuk cara perhitungan adalah sebagai berikut:

Tingkat Satuan Kerja

Komponen Penilaian

	Bobot (%)
1. Kesesuaian dengan SAP	24%
2. Kecukupan Informasi	54%
3. Efektivitas Pengendalian Internal	11%
4. Ketaatan atas Peraturan Perundang-undangan	11%
Jumlah	100%

Pada tanggal 4 September 2025, Biro Keuangan Kementerian Perindustrian telah menyampaikan Surat Plh Kepala Biro Keuangan Nomor B/1088/SJ-IND.3/KU/IX/2025 tentang Penyampaian Hasil Penilaian Laporan Keuangan Tingkat Satker dan Unit Eselon I, dimana BBSPJIA mendapat nilai 93,00.

Capaian ini mencapai 124 % dari yang ditargetkan yaitu nilai 75.

Lampiran Nota Dinas No. : 399/BSKJI 1/KU/IX/2025
 Tanggal : 18 September 2025
 Perihal : Hasil Penilaian Laporan Keuangan Tingkat Satker TA 2024

NILAI LAPORAN KEUANGAN TINGKAT SATUAN KERJA
 KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

NO.	NAMA SATUAN KERJA	NILAI
1	BSPJI BANJARBARU	97 00
2	BSPJI SURABAYA	96 75
3	BSPJI BANDA ACEH	96 50
4	BBSPJI HASIL PERKEBUNAN, MINERAL LOGAM DAN MARITIM	96 00
5	BSPJI MEDAN	95 90
6	BSPJI PONTIANAK	95 75
7	BBSPJI KERAJINAN DAN BATIK	95 00
8	BSPJI PALEMBANG	95 00
9	BBSPJI SELULOSA	95 00
10	BBSPJI PENCEGAHAN PENCEMARAN INDUSTRI	94 75
11	BSPJI AMBON	94 25
12	BBSPJI KULIT KARET DAN PLASTIK	94 00
13	BSPJI BANDAR LAMPUNG	93 40
14	BBSPJI KIMIA, FARMASI DAN KEMASAN	93 25
15	BBSPJI AGRO	93 00
16	BBSPJI LOGAM DAN MESIN	92 50
17	BSPJI PEKANBARU	92 25

b) Kendala

Tidak ada kendala yang berarti

c) Rekomendasi

Evaluasi dari pelaksanaan kegiatan ini adalah meningkatkan koordinasi dengan tim keuangan Sekretariat BSKJI dan Biro Keuangan.

Rencana perbaikan pada tahun selanjutnya adalah mempersiapkan data dukung penyusunan laporan keuangan tahun 2025.

8. Sasaran Kegiatan VII: Meningkatnya penggunaan Produk Dalam Negeri dalam rangka menunjang produktivitas Industri

Sasaran Strategis (SS)	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Realisasi	Capaian	Sampai dengan Triwulan IV			
						% Fisik		Rencana Kegiatan	Realisasi
						Target	Ralisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Meningkatnya penggunaan Produk Dalam Negeri dalam rangka menunjang produktivitas Industri	1. Persentase penggunaan Produk Dalam Negeri dalam pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah	81	Persen	85,17	105,15 %	100	100	Melaksanakan proses pengadaan barang/jasa	1. Melaksanakan proses pengadaan barang/jasa. 2. Melakukan tagging realisasi TKDN pada

Sasaran Strategis (SS)	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Realisasi	Capaian	Sampai dengan Triwulan IV			
						% Fisik		Rencana Kegiatan	Realisasi
						Target	Ralisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									aplikasi SAKTI. 3. Melakukan perhitungan TKDN sampai TW IV dari perhitungan akun terpilih

Sasaran Strategis VII terdiri dari 1 (satu) Indikator Kinerja:

1) Persentase penggunaan Produk Dalam Negeri dalam pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah

Penggunaan produk dalam negeri dalam penggunaan barang dan jasa merupakan salah satu upaya dalam menindaklanjuti Keppres Nomor 24 Tahun 2018 tentang Tim Nasional P3DN. Pengoptimalan penggunaan produk industri dalam negeri bisa dimulai dari pemanfaatan anggaran belanja Kementrian/Lembaga. Dalam hal ini, perhitungan penggunaan produk dalam negeri didasarkan atas realisasi anggaran pada kegiatan pengadaan barang/jasa yang didasarkan pada pemakaian akun untuk belanja pemerintah. Pemakaian akun belanja yang disepakati bersama ada 14 akun meliputi akun 521211, 521219, 521811, 524114, 521111, 522141, 524119, 522131, 522191, 532111, 522111, 5251112, 5251113, dan 5251153.

Perhitungan nilai realisasi capaian penggunaan produk dalam negeri (RP3DN) didapat dari Realisasi anggaran P3DN berdasarkan akun terpilih dibagi total pagu anggaran P3DN berdasarkan akun terpilih.

a) Hasil yang telah dicapai dan analisis capaian kinerja

Pada Triwulan IV 2025 ini, nilai persentase Persentase penggunaan Produk Dalam Negeri dalam pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah sebesar 57, 88 Persen.

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Perindustrian No 4 Tahun 2019 Tentang Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri, BBSPJIA berkewajiban untuk berupaya dalam peningkatan penggunaan produk dalam negeri

Tim Pengadaan BBSPJIA telah menyusun rencana kinerja yang mendukung pencapaian target penggunaan produk dalam negeri dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa di lingkungan BBSPJIA tahun 2025.

Adapun rencana kegiatan Triwulan IV adalah sebagai berikut:

1. Mengutamakan pembelian produk dalam negeri dalam proses pengadaan. Pemeriksaan barang-barang berTKDN pada situs P3DN sebelum melakukan pembelian/pengadaan
2. Melakukan *tagging* realisasi TKDN atas realisasi belanja pada aplikasi SAKTI
3. Rekapitulasi realisasi penggunaan produk dalam negeri berdasarkan *tagging*.

Adapun capaian realisasi fisik dari kegiatan tersebut sampai dengan Triwulan IV yaitu:

1. Mengutamakan pengadaan dengan barang-barang bersertifikat TKDN.
2. Melakukan kegiatan pemeliharaan gedung dan bangunan dengan mengutamakan bahan material produksi dalam negeri.

Tabel 3.8. Rincian Penggunaan Akun Terkait P3DN

No	Akun	Uraian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	TKDN (Rp)	Persentase
1	521211	Belanja Bahan	0			
2	521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	0			
3	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	0			
4	524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	0			
5	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	0			
6	522141	Belanja Sewa	0			
7	524119	Belanja perjalanan lainnya	0			
8	522131	Belanja Jasa Konsultan	0			
9	522191	Belanja Jasa Lainnya	0			
10	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	200,000,000	199,966,500	0	0
11	522111	Belanja Langganan Listrik	864,600,000	857,808,551	857,808,551	99.21%
12	525112	Belanja Barang	1,337,279,000	1,066,358,789	1,066,358,789	79.74%
13	525113	Belanja Jasa	1,528,996,000	1,349,249,705	1,349,249,705	88.24%
14	525115	Belanja Perjalanan	3,014,478,000	2,642,111,530	2,642,111,530	87.65%
		Total	6,945,353,000	6,115,495,075	5,915,528,575	85.17%

Dari tabel diatas diperoleh persentase penggunaan Produk Dalam negeri dalam pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah pada BBSPJIA adalah sebesar 85,17%.

Adapun realisasi tersebut telah mencapai 105,15% dari target tahun 2025 sebesar 81%.

b) Kendala

Tidak ada kendala berarti

c) Rekomendasi

Evaluasi dari pelaksanaan kegiatan ini adalah agar selalu dilakukan monitoring pengadaan barang dan jasa agar pelaksanaan pengadaan sesuai dengan rencana penarikan anggaran yang telah disusun.

3.1.2. Hasil Yang Telah Dicapai dan Analisis Capaian Kinerja Berdasarkan

Indikator pada Klasifikasi Rincian Output (KRO)

Capaian kinerja realisasi keuangan penyerapan anggaran BBSPJIA sampai dengan Triwulan IV TA. 2025 sebesar Rp 43.061.053.873,- atau 95,82% dari pagu efektif sebesar Rp 44.939.538.000,- dan capaian realisasi fisiknya sebesar 100,00%. Realisasi penyerapan anggaran berdasarkan sumber pembiayaan BBSPJIA sampai Triwulan IV TA. 2025 ditampilkan pada Tabel 3.11.

Tabel 3.11 Realisasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja per Tanggal 31 Desember 2025

SUMBER	JENIS BELANJA	PAGU	Pagu Blokir	Pagu Efektif	Realisasi s.d 31-12-2025	% Pagu Total	% Pagu Efektif
RM	51 (B. Pegawai)	9,910,563,000	0	9,910,563,000	9,843,598,677	99.32%	99.32%
	52 (B. Barang)	2,973,368,000	1,527,190,000	1,446,178,000	1,428,159,984	48.03%	98.75%
	53 (B. Modal)	300,000,000	100,000,000	200,000,000	199,966,500	66.66%	99.98%
	Total RM	13,183,931,000	1,627,190,000	11,556,741,000	11,471,725,161	87.01%	99.26%
BLU	52 (B. Barang)	28,064,000,000	857,203,000	27,206,797,000	25,691,694,333	91.55%	94.43%
	52 (B. Barang) Saldo Kas BLU	3,192,400,000	0	3,192,400,000	3,168,345,444	99.25%	99.25%
	53 (B. Modal)	1,736,000,000	1,450,000,000	286,000,000	222,476,236	12.82%	77.79%
	53 (B. Modal) Saldo Kas BLU	2,697,600,000	0	2,697,600,000	2,506,812,699	92.93%	92.93%
	Total BLU	35,690,000,000	2,307,203,000	33,382,797,000	31,589,328,712	88.51%	94.63%
	RM+BLU	48,873,931,000	3,934,393,000	44,939,538,000	43,061,053,873	88.11%	95.82%

Realisasi tersebut dapat dijelaskan secara rinci dari KRO Kegiatan sebagai berikut:

1. Kegiatan I (BAD): Pelayanan Publik Kepada Industri

Output	Pagu (Ribuan Rp)	Triwulan Ini (%)				S.D. Triwulan Ini (%)			
		Keuangan		Fisik		Keuangan		Fisik	
		S	R	S	R	S	R	S	R
BAD Pelayanan Publik kepada industri	11.708.277	11	11	25	25	97	83.92	100	100

a) Hasil yang dicapai dan analisis capaian kinerja

Kegiatan pada Triwulan IV telah dilaksanakan dengan baik. Kegiatan tersebut adalah melaksanakan layanan jasa teknis kepada pelanggan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimum (SPM) BBSPJIA.

Realisasi keuangan dan realisasi fisik Pelayanan Publik Kepada Industri sampai pada Triwulan IV TA. 2025 sudah mencapai target.

b) Kendala

Ada beberapa peralatan laboratorium yang memerlukan perbaikan.

c) Rekomendasi/Tindak Lanjut

- 1) Perbaikan peralatan laboratorium sesuai skala prioritas.
- 2) Penambahan kapasitas layanan dengan cara penambahan sarana dan prasarana khususnya peralatan laboratorium.

2. KRO II (CAH): Sarana Bidang Industri dan Perdagangan

Output	Pagu (Ribuan Rp)	Triwulan Ini (%)				S.D. Triwulan Ini (%)			
		Keuangan		Fisik		Keuangan		Fisik	
		S	R	S	R	S	R	S	R
CAH Sarana Bidang Industri dan Perdagangan	3.043.600	10	8,5	25	25	97	91,98	100	100

a) Hasil yang dicapai dan analisis capaian kinerja

Untuk perhitungan realisasi keuangan berdasarkan data pada SAKTI dimana pada KRO ini semua output telah terlaksana.

b) Kendala

Terdapat sisa pagu anggaran belanja modal yang belum bisa direalisasikan

c) Rekomendasi

Diperlukan percepatan pelaksanaan kegiatan dengan tetap berkoordinasi dengan pihak terkait

3. KRO I (EBA): Layanan Dukungan Manajemen Internal

Output	Pagu (Ribuan Rp)	Triwulan Ini (%)				S.D. Triwulan Ini (%)			
		Keuangan		Fisik		Keuangan		Fisik	
		S	R	S	R	S	R	S	R
EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	29.787.661	6	5.65	25	25	99	98.91	100	100

a) Hasil yang dicapai dan analisis capaian kinerja

Realisasi keuangan dan realisasi fisik Layanan Dukungan Manajemen Internal pada Triwulan IV sudah baik. Kegiatan yang sudah dilaksanakan sampai dengan Triwulan IV TA. 2025 adalah:

A. Layanan Hubungan Masyarakat

Layanan hubungan masyarakat dua RO yaitu

- a. Pengembangan Sistem Informasi Pelayanan Publik
- b. Pelaksanaan Pemasaran/ promosi/ Pameran/ publikasi Layanan Teknis

B. Layanan Perkantoran.

Layanan Perkantoran pada TA. 2025 terdiri dari 2 (dua) komponen. yaitu:

- (1) Pembayaran Gaji dan Tunjangan;
- (2) Operasional Perkantoran

Realisasi keuangan KRO ini pada Triwulan IV TA. 2025 mencapai 98,91% .

b) Kendala

Tidak ada kendala yang cukup berarti

c) Rekomendasi

Pelaksanaan kegiatan operasional perkantoran harus lebih efisien, hemat berdasarkan skala prioritas

4. KRO V (EBB): Layanan Sarana dan Prasarana Internal

Output	Pagu (Ribuan Rp)	Triwulan Ini (%)				S.D. Triwulan Ini (%)			
		Keuangan		Fisik		Keuangan		Fisik	
		S	R	S	R	S	R	S	R
EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal	90.000	45	45,93	25	25	97	90.66	100	100

a) Hasil yang dicapai dan analisis capaian kinerja

Untuk RO Layanan Sarana Internal pada Triwulan IV TA. 2025 telah dilaksanakan pengadaan peralatan inventaris perkantoran dan peralatan pengolah data dan komunikasi.

b) Kendala

Tidak Ada

c) Rekomendasi

Pengadaan peralatan perkantoran yang bersumber dari PNBPN masih harus melihat realisasi penerimaan. Apabila realisasi penerimaan telah mencukupi barulah dilaksanakan pengadaan peralatan perkantoran.

5. KRO VI (EBC): Layanan Manajemen SDM Internal

Output	Pagu (Ribuan Rp)	Triwulan Ini (%)				S.D. Triwulan Ini (%)			
		Keuangan		Fisik		Keuangan		Fisik	
		S	R	S	R	S	R	S	R
EBC Layanan Manajemen SDM Internal	310.000	15	12.52	25	25	95	86.46	100	100

a) Hasil yang dicapai dan analisis capaian kinerja

Pegawai BBSPJIA sudah mengikuti berbagai diklat; baik itu teknis ataupun non teknis. Diklat bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan kompetensi pegawai BBSPJIA dalam berbagai bidang guna menunjang pelaksanaan Jasa Pelayanan Teknis sesuai TUPOKSI BBSPJIA serta dalam rangka pengembangan karir pegawai BBSPJIA sebagai tenaga/pejabat Fungsional.

b) Kendala

Secara umum, tidak ada kendala pada Kegiatan Layanan Manajemen SDM internal pada sampai dengan Triwulan IV ini.

c) Rekomendasi

Sebaiknya dibuat rencana pengembangan kompetensi pegawai BBSPJIA berdasarkan usulan kebutuhan pelatihan dari masing-masing Koordinator serta kebutuhan organisasi. Setiap pegawai diupayakan untuk mengikuti pelatihan untuk peningkatan kompetensinya sehingga bermanfaat bagi jalannya organisasi.

3.2. Hambatan dan Kendala Pelaksanaan

Hambatan dan kendala pencapaian sasaran kegiatan ataupun kinerja *output* kegiatan pada Triwulan IV Tahun 2025, sebagai berikut:

3.2.1. Hambatan dan Kendala Pelaksanaan Perjanjian Kinerja

Dalam pelaksanaan kegiatan untuk pemenuhan target indikator kinerja dalam Perjanjian Kinerja (Perkin) sebagian besar tercapai tetapi ada satu indikator kinerja yaitu Jumlah perusahaan industri/pelaku usaha/instansi yang memanfaatkan

layanan jasa industri yang tidak tercapai. Hal ini dikarenakan ada beberapa layanan yang jumlah kliennya tidak memenuhi target.

Terkait dengan layanan sertifikasi, proses administrasi melalui SIINAS membutuhkan waktu yang cukup lama dan pelanggan mengalami kesulitan dalam pemenuhan berbagai dokumen yang harus dilengkapi. Adanya penurunan penerimaan layanan sertifikasi juga berdampak langsung kepada penurunan penerimaan klien layanan pengujian. Selain itu kegiatan bimbingan teknis, pelatihan dan pendampingan dari para pelanggan seperti pemerintah daerah mengalami penurunan karena efisiensi anggaran.

3.2.2. Hambatan dan Kendala Pelaksanaan Kinerja Kegiatan

Beberapa hambatan dan kendala pelaksanaan kinerja kegiatan meliputi:

- a) Adanya kebijakan efisiensi anggaran menyebabkan anggaran untuk mendukung operasional layanan menjadi berkurang dan dialihkan untuk mengakomodir kegiatan dukungan manajemen, kegiatan pengadaan peralatan laboratorium menjadi lebih minim dan jumlah SDM yang direncanakan untuk ditingkatkan kompetensinya melalui kegiatan pelatihan menjadi lebih sedikit
- b) Adanya kebijakan efisiensi anggaran sehingga untuk kegiatan pengadaan peralatan laboratorium dan inventaris kantor harus menggunakan anggaran yang bersumber dari saldo kas BLU

3.3. Langkah Tindak Lanjut

3.3.1. Langkah dan Tindak Lanjut Pelaksanaan Perjanjian Kinerja

1. Perbaiki peralatan terkait layanan yang mengalami kerusakan dan modernisasi/penambahan peralatan sesuai dengan skala prioritas dan ketersediaan anggaran
2. Untuk meningkatkan indeks profesionalitas ASN maka perlu ditingkatkan lagi jumlah pelatihan yang diikuti para Pegawai dan diatur agar keikutsertaan dalam pelatihan agar lebih merata ke semua pegawai sehingga tidak hanya sebagian kecil saja Pegawai yang mengikuti pelatihan.
3. Untuk meningkatkan nilai akuntabilitas organisasi perlu dilakukan perbaikan sesuai dengan rekomendasi yang diberikan oleh Auditor Inspektorat Jenderal yang tercantum pada Lembar Hasil Evaluasi (LHE) SAKIP 2024.

3.3.2. Langkah dan Tindak Lanjut Pelaksanaan Kinerja Kegiatan

- ✓ Pelayanan kepada pelanggan (industri) harus tetap dilaksanakan dengan optimal dan prima.
- ✓ Pengembangan dan penambahan ruang lingkup layanan serta penyempurnaan aplikasi untuk menunjang layanan.
- ✓ Apabila diproyeksikan terdapat anggaran yang tidak terealisasi maka dilakukan realokasi anggaran untuk kegiatan yang membutuhkan tambahan alokasi anggaran

BAB IV

PENUTUP

4.1 Realisasi Kegiatan

Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Agro (BBSPJIA) telah menetapkan 1 (satu) tujuan dan 7 (tujuh) sasaran strategis dengan 18 (delapan belas) indikator kinerja dalam perjanjian kinerja (Perjakin) pada TA. 2025. Berdasarkan hasil realisasi pelaksanaan kegiatan selama triwulan IV, hampir semua target dari indikator kinerja pada perjanjian kinerja telah tercapai. Satu satunya indikator kinerja yang tidak tercapai yaitu pada indikator jumlah perusahaan industri/pelaku usaha/instansi yang memanfaatkan layanan jasa industri. Dari yang ditargetkan sebesar 3.750 perusahaan industri/ pelaku usaha/ instansi realisasi hanya mencapai 3.734 perusahaan industri/ pelaku usaha/ instansi. Hal ini dikarenakan ada beberapa layanan yang jumlah kliennya tidak memenuhi target.

Sementara itu dari sisi pelaksanaan anggaran, realisasi penyerapan anggaran BBSPJIA sampai dengan triwulan IV TA. 2025 sebesar Rp **43.061.053.873,-** atau **88,11 %** dari pagu total sebesar Rp **48.873.931.000,-**. Apabila dibandingkan dengan pagu efektif (setelah efisiensi anggaran) sebesar Rp **44.939.538.000,-** maka realisasi keuangan mencapai **95,82%** serta capaian realisasi fisiknya sebesar 100 %. Realisasi keuangan terhadap pagu efektif BBSPJIA pada triwulan IV ini berada dibawah target BSKJI yaitu sebesar **99,01%**.

Realisasi PNBPNP sampai dengan bulan Desember 2025 adalah sebesar Rp **32.650.692.572,-** atau **109,57%** dari target PNBPNP 2025 sebesar Rp 29.800.000.000,-.

Secara umum capaian fisik kegiatan tahun 2025 telah tercapai 100% yang diindikasikan dengan tercapainya seluruh target Rincian Output yang ditetapkan dalam DIPA BBSPJIA TA 2025.

4.2 Hambatan dan Kendala Pelaksanaan

Hambatan dan kendala umum secara keseluruhan dalam mencapai sasaran dalam Perjanjian Kinerja BBSPJIA Tahun 2025 yaitu ada beberapa layanan yang jumlah kliennya tidak memenuhi target. Terkait dengan layanan sertifikasi, proses administrasi melalui SIINAS membutuhkan waktu yang cukup lama dan pelanggan

mengalami kesulitan dalam pemenuhan berbagai dokumen yang harus dilengkapi. Adanya penurunan penerimaan layanan sertifikasi juga berdampak langsung kepada penurunan penerimaan klien layanan pengujian. Selain itu kegiatan bimbingan teknis, pelatihan dan pendampingan dari para pelanggan seperti pemerintah daerah mengalami penurunan karena efisiensi anggaran

Hambatan dan kendala umum secara keseluruhan dalam mencapai target kinerja output kegiatan adalah adanya kebijakan efisiensi anggaran sehingga anggaran yang semula bisa diakomodir oleh rupiah murni menjadi sangat terbatas dan harus ditanggulangi dengan anggaran PNBP BLU, yang pada akhirnya kegiatan yang dibiayai PNBP menjadi tidak maksimal. Blokir anggaran pada pengadaan peralatan laboratorium juga mengganggu kelancaran pelaksanaan layanan jasa teknis. Beberapa peralatan yang sangat dibutuhkan untuk menggantikan peralatan yang sudah rusak menjadi tertunda pengadaannya.

4.3 Langkah Tindak Lanjut

Berdasarkan kendala yang dihadapi maka BBSPJIA perlu melakukan beberapa langkah tindak lanjut yaitu:

- Pelayanan kepada pelanggan (industri) harus tetap dilaksanakan dengan optimal dan prima.
- Pengembangan dan penambahan ruang lingkup layanan serta penyempurnaan aplikasi untuk menunjang layanan
- Untuk mendukung optimalisasi penyerapan anggaran pada pelaksanaan kegiatantahun berikutnya, masing-masing koordinator kegiatan diharapkan agar lebih cermat dalam menyusun rencana kinerja berikut rencana penyerapan anggaran serta melakukan identifikasi atas potensi anggaran yang tidak terserap

RENCANA AKSI TAHUN 2025

Kode.	Sasaran Strategis (SS)	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Sampai dengan Triwulan I		Sampai dengan Triwulan II		Sampai dengan Triwulan III		Sampai dengan Triwulan IV		
					Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan	
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	
Tj	Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan jasa industri	1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	3,72	Indeks	25	Membuat kuesioner survei di google form; Melaksanakan Survei; Mengolah data hasil survei	50	Membuat kuesioner survei di google form; Melaksanakan Survei; Mengolah data hasil survei	75	Membuat kuesioner survei di google form; Melaksanakan Survei; Mengolah data hasil survei	100	Membuat kuesioner survei di google form; Melaksanakan Survei; Mengolah data hasil survei
		2	Jumlah perusahaan industri/pelaku usaha/instansi yang memanfaatkan layanan jasa industri	3,750	Perusahaan Industri/ Pelaku Usaha/ Instansi	25	Mengidentifikasi utilisasi layanan jasa industri di dalam negeri yang meliputi, rancang bangun dan perekayasaan di bidang industri, standardisasi dan sertifikasi, pengujian, kalibrasi serta bombing dan pendampingan teknis	50	Mengidentifikasi utilisasi layanan jasa industri di dalam negeri yang meliputi, rancang bangun dan perekayasaan di bidang industri, standardisasi dan sertifikasi, pengujian, kalibrasi serta bombing dan pendampingan teknis	75	Mengidentifikasi utilisasi layanan jasa industri di dalam negeri yang meliputi, rancang bangun dan perekayasaan di bidang industri, standardisasi dan sertifikasi, pengujian, kalibrasi serta bombing dan pendampingan teknis	100	Mengidentifikasi utilisasi layanan jasa industri di dalam negeri yang meliputi, rancang bangun dan perekayasaan di bidang industri, standardisasi dan sertifikasi, pengujian, kalibrasi serta bombing dan pendampingan teknis
SK1	Terwujudnya layanan jasa industri yang profesional	1	Persentase pelayanan tepat waktu Layanan sesuai Service Level Agreement (SLA)	95,00	Persen	25	Melakukan pelayanan sesuai SPM	50	Melakukan pelayanan sesuai SPM	75	Melakukan pelayanan sesuai SPM	100	Melakukan pelayanan sesuai SPM
		2	Nilai Net Promoter Score (NPS)	50	Nilai	25	Melakukan perhitungan nilai NPS Triwulan I	50	Melakukan perhitungan nilai NPS Triwulan II	75	Melakukan perhitungan nilai NPS Triwulan III	100	Melakukan perhitungan nilai NPS Triwulan IV
SK2	Terwujudnya layanan jasa industri yang mandiri	1	Indeks peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	1	Indeks	25	Mengidentifikasi utilisasi layanan jasa industri di dalam negeri yang meliputi, rancang bangun dan perekayasaan di bidang industri, standardisasi dan sertifikasi, pengujian, kalibrasi serta pelatihan teknis	50	Pengadaan utilisasi layanan jasa industri di dalam negeri yang meliputi, rancang bangun dan perekayasaan di bidang industri, standardisasi dan sertifikasi, pengujian, kalibrasi serta pelatihan teknis	75	Pengadaan utilisasi layanan jasa industri di dalam negeri yang meliputi, rancang bangun dan perekayasaan di bidang industri, standardisasi dan sertifikasi, pengujian, kalibrasi serta pelatihan teknis	100	Laporan pengadaan dan aplikasi utilisasi layanan jasa industri di dalam negeri yang meliputi, rancang bangun dan perekayasaan di bidang industri, standardisasi dan sertifikasi, pengujian, kalibrasi serta pelatihan teknis
		2	Jumlah hasil layanan jasa industri	20,600	Hasil Layanan	25	Mengidentifikasi utilisasi layanan jasa industri di dalam negeri yang meliputi, rancang bangun dan perekayasaan di bidang industri, standardisasi dan sertifikasi, pengujian, kalibrasi serta pelatihan teknis	50	Pengadaan utilisasi layanan jasa industri di dalam negeri yang meliputi, rancang bangun dan perekayasaan di bidang industri, standardisasi dan sertifikasi, pengujian, kalibrasi serta pelatihan teknis	75	Pengadaan utilisasi layanan jasa industri di dalam negeri yang meliputi, rancang bangun dan perekayasaan di bidang industri, standardisasi dan sertifikasi, pengujian, kalibrasi serta pelatihan teknis	100	Laporan pengadaan dan aplikasi utilisasi layanan jasa industri di dalam negeri yang meliputi, rancang bangun dan perekayasaan di bidang industri, standardisasi dan sertifikasi, pengujian, kalibrasi serta pelatihan teknis
		3	Nilai <i>Revenue on Asset</i> (RoA)	8,40	Persen	25	Melakukan perhitungan nilai RoA triwulan I	50	Melakukan perhitungan nilai RoA triwulan II	75	Melakukan perhitungan nilai RoA triwulan III	100	Melakukan perhitungan nilai RoA triwulan IV
		4	Rasio Pendapatan Operasional terhadap Biaya Operasional (POBO)	75,00	Persen	25	Melakukan perhitungan nilai rasio POBO Triwulan I	50	Melakukan perhitungan nilai rasio POBO Triwulan II	75	Melakukan perhitungan nilai rasio POBO Triwulan III	100	Melakukan perhitungan nilai rasio POBO Triwulan IV
SK3	Terwujudnya SDM yang profesional	1	Indeks Profesionalitas ASN (IPASN)	81,3	Indeks	25	Menginventarisir kebutuhan pelatihan Pegawai, memantau tingkat disiplin pegawai	50	Melaksanakan pelatihan/diklat peningkatan kompetensi Pegawai sesuai dengan kebutuhan, dan memantau tingkat disiplin pegawai	75	Melaksanakan pelatihan/diklat peningkatan kompetensi Pegawai sesuai dengan kebutuhan, dan memantau tingkat disiplin pegawai	100	Melaksanakan pelatihan/diklat peningkatan kompetensi Pegawai sesuai dengan kebutuhan, dan memantau tingkat disiplin pegawai
SK4	Penguatan sistem informasi terintegrasi dan pelayanan publik	1	Persentase jenis layanan yang datanya terintegrasi dengan sistem informasi BSKJI	20,00	Persen	25	Persiapan dan Koordinasi dengan Sekretariat BSKJI	50	Persiapan dan Koordinasi dengan Sekretariat BSKJI	75	Persiapan dan Koordinasi dengan Sekretariat BSKJI	100	Persiapan dan Koordinasi dengan Sekretariat BSKJI
		2	Tingkat Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	77	Persen	25	Perhitungan dan evaluasi tingkat SPBE Triwulan	50	Perhitungan dan evaluasi tingkat SPBE Triwulan	75	Perhitungan dan evaluasi tingkat SPBE Triwulan	100	Perhitungan dan evaluasi tingkat SPBE Triwulan
		3	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	4,20	Indeks	25	Melakukan pelayanan sesuai SPM	50	Melakukan pelayanan sesuai SPM	75	Melakukan pelayanan sesuai SPM	100	Melakukan pelayanan sesuai SPM
SK5	Tercapainya pengawasan internal yang efektif dan efisien	1	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh Satker	60	Persen	25	Mengoptimalkan fungsi SPI secara independen	50	Mengoptimalkan fungsi SPI secara independen	75	Mengoptimalkan fungsi SPI secara independen	100	Mengoptimalkan fungsi SPI secara independen

Kode	Sasaran Strategis (SS)	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Sampai dengan Triwulan I		Sampai dengan Triwulan II		Sampai dengan Triwulan III		Sampai dengan Triwulan IV		
					Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan	
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	
		2	Nilai minimal hasil pengawasan kearsipan internal (Unit Kearsipan)	85,00	Nilai	25	Pelaksanaan sistem kearsipan secara tertib dan sistematis	50	Pelaksanaan sistem kearsipan secara tertib dan sistematis	75	Pelaksanaan sistem kearsipan secara tertib dan sistematis	100	Pelaksanaan sistem kearsipan secara tertib dan sistematis
SK6	Terwujudnya akuntabilitas organisasi	1	Nilai minimal Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Satker	79,90	Nilai	25	Menyusun dokumen AKIP sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu serta diarsipkan dengan baik	50	Menyusun dokumen AKIP sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu serta diarsipkan dengan baik	75	Menyusun dokumen AKIP sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu serta diarsipkan dengan baik	100	Menyusun dokumen AKIP sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu serta diarsipkan dengan baik
		2	Nilai minimal Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	95,00	Nilai	25	Melaporkan keuangan secara transparan dan tepat waktu	50	Melaporkan keuangan secara transparan dan tepat waktu	75	Melaporkan keuangan secara transparan dan tepat waktu	100	Melaporkan keuangan secara transparan dan tepat waktu
		3	Penilaian dan Analisis Laporan Keuangan	75	Nilai	25	Penyusunan laporan Keuangan secara sistematis, akuntabel dan tepat waktu	50	Penyusunan laporan Keuangan secara sistematis, akuntabel dan tepat waktu	75	Penyusunan laporan Keuangan secara sistematis, akuntabel dan tepat waktu	100	Penyusunan laporan Keuangan secara sistematis, akuntabel dan tepat waktu
SK7	Meningkatnya penggunaan Produk Dalam Negeri dalam rangka menunjang produktivitas Industri	1	Persentase penggunaan Produk Dalam Negeri dalam pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah	81	Persen	25	Penyusunan dokumen Pengadaan barang dan jasa dari perusahaan lokal yang kompetitif	50	Pengadaan barang dan jasa dari perusahaan lokal yang kompetitif	75	Pengadaan barang dan jasa dari perusahaan lokal yang kompetitif	100	Pengadaan barang dan jasa dari perusahaan lokal yang kompetitif

Bogor, Desember 2025
Kepala Balai Besar Standardisasi
dan Pelayanan Jasa Industri Agro



Yuni Herlina Harahap

REALISASI RENCANA AKSI SAMPAI TRIWULAN IV TA. 2025
BALAI BESAR STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI AGRO

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Target	Realisasi	Capaian	Sampai Triwulan IV				Kendala	Tindak Lanjut	Penanggung Jawab Tindak Lanjut	Target Penyelesaian Tindak Lanjut	
						% Fisik		Rencana	Kegiatan					
						Target Antara	Realisasi							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
TJ	Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan jasa industri	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	3.72	Indeks	3.76	101.07	100	100	Membuat kuesioner survei di google form; Melaksanakan Survei; Mengolah data hasil survei	1. Menyusun kuesioner survei 2. Menentukan responden pengguna layanan 3. Menyampaikan atau mengirimkan kuesioner kepada responden 4. Menghitung Indeks Kepuasan Masyarakat Triwulan IV Tahun 2025 5. Mengevaluasi hasil Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap perbaikan layanan jasa industri	• Pelanggan cenderung memberikan nilai netral (baik), meskipun puas dengan layanan yang telah diberikan.	- Memonitor jumlah pengisian kuesioner, jika terdapat pelanggan yang belum mengisi maka petugas akan mengirimkan kuesioner ulang melalui aplikasi Whatsapp.	Ketua Tim Pengembangan Usaha dan Kemitraan; Pelayanan Jasa Industri	Desember 2025
		Jumlah perusahaan industri/pelaku usaha/instansi yang memanfaatkan layanan jasa industri	3.750	Perusahaan Industri/ Pelaku Usaha/ Instansi	3.734	99.57	100	100	Mengidentifikasi utilisasi layanan jasa industri di dalam negeri yang meliputi, rancang bangun dan perkerayaan di bidang industri, standarisasi dan sertifikasi, pengujian, kalibrasi serta bimbingan dan pendampingan teknis	1. Identifikasi target pasar 2. Evaluasi layanan yang ada 3. Penyusunan strategi pemasaran 4. Peningkatan branding dan awareness 5. Sosialisasi dan edukasi 6. Kolaborasi dan kemitraan	1. Banyak industri, terutama skala kecil dan menengah (UMKM), belum mengetahui manfaat menggunakan layanan BBSPJIA. 2. Banyak lembaga serupa yang menawarkan layanan serupa, baik dari pemerintah maupun swasta. 3. Beberapa industri lebih memilih lembaga dengan harga lebih murah atau proses yang lebih cepat. 4. Adanya kebijakan efisiensi anggaran untuk kegiatan pemasaran/promosi sehingga sulit untuk menjalankan promosi besar-besaran secara masif. 5. Terbatasnya atau kurangnya sistem layanan pelanggan yang responsif untuk menangani pertanyaan atau permintaan industri dengan cepat	1. Penambahan anggaran untuk pemasaran dan promosi, untuk meningkatkan citra dan daya jangkauan pengenalan layanan jasa yang dimiliki BBSPJIA. 2. Mengoptimalkan media sosial, website, dan iklan digital untuk menjangkau lebih banyak industri. 3. Rutin mengadakan acara edukatif dan kolaborasi dengan asosiasi industri. 4. Mengunjungi perusahaan dan menawarkan konsultasi langsung 5. Publikasi testimoni klien sukses	Pengembangan Usaha dan Kemitraan; Pelayanan Jasa Industri; Standardisasi; Optimalisasi Teknologi Industri dan Digitalisasi	Desember 2025
SK.1	Terwujudnya layanan jasa industri yang profesional	Persentase pelayanan tepat waktu Layanan sesuai Service Level Agreement (SLA)	95	Persen	100	105.26	100	100	Melakukan pelayanan sesuai SPM	Melakukan pelayanan sesuai SPM	Adanya kebijakan efisiensi anggaran mengakibatkan kegiatan sempat terhenti sementara	Melakukan penyesuaian pelaksanaan kegiatan	Semua Ketua Tim Kerja	Desember 2025
		Nilai Net Promoter Score (NPS)	50	Nilai	72.99	145.98	100	100	Melakukan perhitungan nilai NPS Triwulan IV	1. Menyusun kuesioner survei 2. Menentukan responden pengguna layanan 3. Kurangnya pemahaman pelanggan terhadap NPS 4. Hambatan teknis dalam pengumpulan data	1. Belum stabilnya tingkat respons 2. Bias dalam pengisian survei 3. Kurangnya pemahaman pelanggan terhadap NPS 4. Hambatan teknis dalam pengumpulan data	1. Perlu komunikasi yang persuasif kepada pelanggan untuk mengisi kuesioner, dan mensosialisasikan terkait nilai tersebut terhadap kredibilitas instansi 2. Memonitor jumlah pengisian kuesioner, jika terdapat pelanggan yang belum mengisi maka petugas akan mengirimkan kuesioner ulang melalui aplikasi whatsapp	Ketua Tim Pengembangan Usaha dan Kemitraan; Pelayanan Jasa Industri	Desember 2025
SK.2	Terwujudnya layanan jasa industri yang mandiri	Indeks peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	1	Indeks	2	200	100	100	Mengidentifikasi utilisasi layanan jasa industri di dalam negeri yang meliputi, rancang bangun dan perkerayaan di bidang industri, standarisasi dan sertifikasi, pengujian, kalibrasi serta pelatihan teknis	Mengidentifikasi utilisasi layanan jasa industri di dalam negeri yang meliputi, rancang bangun dan perkerayaan di bidang industri, standarisasi dan sertifikasi, pengujian, kalibrasi serta pelatihan teknis	- Beberapa peralatan laboratorium mengalami kerusakan seperti TOC meter, Karl fischer (sehingga harus sub kontrak pengujian ke lab lain) AAS GTA, ruang asam berpengaruh terhadap kapasitas laboratorium - Keterbatasan peralatan pendukung mikrobiologi seperti : membran filtrasi, dan tabung uji	- Pengadaan dan perbaikan infrastruktur standarisasi - BBPSJIA perlu mengembangkan layanan lain untuk mencapai target penerimaan PNBP BLU yang telah ditetapkan	Semua Tim Kerja	Desember 2025
		Jumlah hasil layanan jasa industri	20.600	Hasil Layanan	23.090	112.09	100	100	Mengidentifikasi utilisasi layanan jasa industri di dalam negeri yang meliputi, rancang bangun dan perkerayaan di bidang industri, standarisasi dan sertifikasi, pengujian, kalibrasi serta pelatihan teknis	Mengidentifikasi utilisasi layanan jasa industri di dalam negeri yang meliputi, rancang bangun dan perkerayaan di bidang industri, standarisasi dan sertifikasi, pengujian, kalibrasi serta pelatihan teknis	Kendala yang dihadapi antara lain persaingan dengan lembaga sejenis terutama dengan Laboratorium/Perusahaan swasta semakin ketat	Meningkatkan kualitas terutama waktu layanan (delivery time) agar dapat bersaing dengan kompetitor	Kepala Bagian Tata Usaha dan Ketua Tim Semua Tim yg punya layanan jasa teknis (Pengujian dan Kalibrasi; Inspeksi Teknis, PUP, PBA, dan Pemeriksaan Halal; Sertifikasi;Standardisasi, Optimalisasi Teknologi Industri dan Digitalisasi;	Desember 2025
		Nilai Revenue on Asset (RoA)	8.4	Persen	8.85	105.36	100	100	Melakukan perhitungan nilai RoA triwulan IV	Melakukan perhitungan nilai RoA triwulan IV	Belum ada kendala yang berarti	Peningkatan layanan agar penerimaan juga dapat meningkat	Kepala Bagian Tata Usaha dan Ketua Tim Umum, Arsip, dan Barang Milik Negara Keuangan	Desember 2025
		Rasio Pendapatan Operasional terhadap Biaya Operasional (POBO)	75	Persen	81.36	108.48	100	100	Melakukan perhitungan nilai rasio POBO Triwulan IV	Melakukan perhitungan nilai rasio POBO Triwulan IV	Belum ada kendala yang berarti	Peningkatan layanan agar penerimaan juga dapat meningkat	Kepala Bagian Tata Usaha dan Ketua Tim Keuangan	Desember 2025
SK.3	Terwujudnya SDM yang profesional	Indeks Profesionalitas ASN (IPASN)	81.30	Indeks	82.68	101.70	100	100	Melaksanakan pelatihan/diklat peningkatan kompetensi Pegawai sesuai dengan kebutuhan, dan memantau tingkat disiplin pegawai	Melaksanakan inhouse training dan juga mengirimkan pegawai untuk mengikuti pelatihan eksternal	Belum ada kendala yang berarti	Agar indeks profesionalitas ASN BBSPJIA semakin meningkat, salah satu upaya yang bisa dilakukan adalah mendorong para pegawai BBSPJIA untuk meningkatkan kompetensi dengan cara mengikuti berbagai pelatihan ataupun diklat	Kepala Bagian Tata Usaha dan Ketua Tim Kepegawaian	Desember 2025
SK.4	Penguatan sistem informasi terintegrasi dan pelayanan publik	Persentase jenis layanan yang datanya terintegrasi dengan sistem informasi BSKJI	20	Persen	20	100	100	100	Persiapan dan Koordinasi dengan Sekretariat BSKJI	Persiapan dan Koordinasi dengan Sekretariat BSKJI	Belum ada kendala yang berarti	Berkordinasi dengan bagian terkait yaitu bagian umum Sekretariat BSKJI agar perhitungan jenis layanan yang datanya terintegrasi dengan sistem informasi BSKJI dapat diukur dengan baik	Ketua Tim SOPTIDI	Desember 2025
		Tingkat Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	77	Persen	78.3	101.69	100	100	Perhitungan dan evaluasi tingkat SPBE Akhir	Perhitungan dan evaluasi tingkat SPBE Akhir	Belum ada kendala yang berarti	Melengkapi data dukung di Triwulan IV	Ketua Tim SOPTIDI	Desember 2025
		Indeks Pelayanan Publik (IPP)	4.20	Indeks	4.35	103.57	100	100	Melakukan pelayanan sesuai SPM	Melakukan pelayanan sesuai SPM	Data yang diperlukan untuk perhitungan nilai indeks Pelayanan Publik BBSPJIA belum lengkap	Berkordinasi dengan bagian terkait agar data yang diperlukan untuk perhitungan nilai indeks Pelayanan Publik BBSPJIA tersedia dengan baik	Ketua Tim Pelayanan Jasa Industri	Desember 2025
SK.5	Tercapainya pengawasan internal yang efektif dan efisien	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh Satker	60	Persen	100	166.67	100	100	Mengoptimalkan fungsi SPI secara independen	Mengoptimalkan fungsi SPI secara independen	Belum ada	BBSPJIA akan terus berkoordinasi dengan pihak Inspektorat Jenderal	Kepala Bagian Tata Usaha	Desember 2025
		Nilai minimal hasil pengawasan kearsipan internal (Unit Kearsipan)	85.00	Nilai	89.50	105.29	100	100	Pengelolaan kearsipan internal merujuk pada unit kearsipan sesuai peraturan ANRI Nomor 8 Tahun 2019	Pengelolaan kearsipan internal merujuk pada unit kearsipan sesuai peraturan ANRI Nomor 8 Tahun 2019	Belum ada kendala yang berarti	Perlu koordinasi intensif dengan bagian umum Sekretariat BSKJI dan Biro Umum kementerian	Kepala Bagian Tata Usaha dan Ketua Tim Umum	Desember 2025
SK.6	Terwujudnya akuntabilitas organisasi	Nilai minimal Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Satker	79.90	Nilai	83.00	103.88	100	100	Menyusun dokumen AKIP sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu serta diarsipkan dengan baik	Menyusun dokumen AKIP sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu serta diarsipkan dengan baik - Mengikuti evaluasi penilaian SAKIP satker di lingkungan BSKJI	Adanya perubahan aturan penilaian yang bersifat lebih kompleks sehingga memerlukan penyesuaian dan tindak lanjut yang sangat mendalam	Menindaklanjuti rekomendasi hasil penilaian SAKIP agar nilai tahun mendatang dapat meningkat	Kepala Bagian Tata Usaha dan Ketua Tim Program dan Pelaporan	Desember 2025
		Nilai minimal Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	95.00	Nilai	100	105.26	100	100	Menginput pemutakhiran perencanaan dan pelaporan anggaran secara tepat waktu	Menginput pemutakhiran perencanaan dan pelaporan anggaran secara tepat waktu	Belum ada kendala yang berarti	BBSPJIA akan terus meningkatkan kinerja dalam pelaporan anggaran dan keuangan	Kepala Bagian Tata Usaha dan Ketua Tim Keuangan dan Tim Program dan Pelaporan	Desember 2025
		Penilaian dan Analisis Laporan Keuangan	75.00	Nilai	93.00	124	100	100	Menginput pemutakhiran perencanaan dan pelaporan anggaran secara tepat	Menginput pemutakhiran perencanaan dan pelaporan anggaran secara tepat	Belum ada kendala yang berarti	BBSPJIA akan terus meningkatkan kinerja dalam pelaporan anggaran dan keuangan	Kepala Bagian Tata Usaha dan Ketua Tim Keuangan dan Tim Program dan Pelaporan	Desember 2025
SK.7	Meningkatnya penggunaan Produk Dalam Negeri dalam rangka menunjang produktivitas Industri	Persentase penggunaan Produk Dalam Negeri dalam pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah	81	Persen	85.17	105.15	100	100	Pelaksanaan Pengadaan barang dan jasa sesuai aturan yang berlaku	Pelaksanaan Pengadaan barang dan jasa sesuai aturan yang berlaku	Belum ada kendala berarti pada penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa di BBSPJIA	Guna menekan nilai impor, terutama pada pengadaan bahan kimia dan penolong, salah satu upaya yang akan dilakukan BBSPJIA adalah dengan melakukan substitusi sebagian bahan kimia impor dengan produk lokal	PPK dan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	Desember 2025



